EDISI KHUSUS

No. 189 Oktober 2021

www.baktinews.bakti.or.id

BaKTINews

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ROAD TO **FESTIVAL FORUM KAWASAN TIMUR INDONESIA**

Semangat Kolaborasi untuk Indonesia

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X

9 771979 777057

BaKTINews
MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA
ISSN 1979-777X
www.baktinews.bakti.or.id

Penanggung Jawab M. YUSRAN LAITUPA
ZUSANNA GOSAL
Editor VICTORIA NGANTUNG
ITA MASITA IBNU

Editor Foto ICHSAN DJUNAED
Design & Layout ICHSAN DJUNAED
Sirkulasi KHAIRIL ANWAR

Redaksi
Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10, Makassar 90223, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 0411 832228 / 833383
Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id
Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTI Instagram @InfoBaKTI

BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur lndonesia. Tujuan BaKTINews adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTINews terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan lnggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTINews disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTINews agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTINews juga dapat diakses di website BaKTI: www.baktinews.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTINews dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTINews adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTINews is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTINews aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTINews is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.

BaKTINews is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTINews is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTINews is also provided in an electronic version that can be accessed on www.baktinews.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.

BaKTINews is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews
Contributing to BaKTINews

BaKTINews menerima artikel tentang praktik baik dan pembelajaran program pembangunan, hasil-hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTINews akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

BaKTINews accepts articles about good practices and lesson learnt from development programs, applied research results, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. Our editor team will edit each article to ensure the language style and available space. BaKTINews does not provide fee for authors who contribute articles for this magazine.

MENJADI PELANGGAN BaKTINews
Subscribing to BaKTINews

Anda dapat mengisi formulir yang tersedia pada laman BaKTINews Online baktinews.bakti.or.id untuk dapat menerima majalah BaKTINews langsung ke email Anda setiap bulannya. Jika Anda tinggal di Makassar, Anda dapat mengambil majalah BaKTINews cetak di Kantor BaKTI setiap hari kerja.

You may fill out the form available on the BaKTINews Online page to be able to receive BaKTINews magazine directly to your email every month. If you live in Makassar, you can pick up the printed BaKTINews magazine at the BaKTI office on weekdays.

Daftar Isi

BaKTINews November 2021 No. **189**

1 Kolaborasi Dari Timur Untuk Indonesia

12 Satu Tahun PROSPPEK-OTSUS di Papua Barat
Oleh **HALIA ASRIYANI**

17 Belajar Dari Proses Kajian Kolaboratif Rantai Nilai Sutra
Bagian I
Oleh **NURHADY SIRIMOROK**

23 Indonesia Bisa Panen Listrik Besar-besaran dari 10 Miliar Panel Surya, Berikut Tempat Ideal Untuk Memasangnya
Oleh **DAVID FIRNANDO SILALAHI** & **ANDREW BLAKERS**

27 Membudayakan Pola Asuh Anak Tanpa Kekerasan
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**

31 Melihat Kader Tanama Bekerja
Oleh **SYAIFULLAH**

35 Perencanaan Partisipatif Pengelolaan Irigasi Salobunne Kabupaten Soppeng
Oleh **ARYANTI SAYADI, SP**

38 Hari Literasi 2021: Pemerintah dan Masyarakat Perlu Kembangkan Terus Pendekatan yang Beragam
Oleh **NOVI KURNIA** & **ZAINUDDIN MUDA Z. MONGGILO**

40 Diskusi Online Live di Instagram Story@infobakti

41 Terbaru di Batukarinfo

Foto Cover: **Yayasan BaKTI**

Foto: **Yusuf Ahmad/KOMPAK**

ROAD TO
FESTIVAL FORUM KAWASAN TIMUR INDONESIA

Semangat Kolaborasi untuk Indonesia

Pandemi COVID-19 telah mengubah cara kita bekerja dan beraktivitas, mendorong kita berinovasi dan beradaptasi menyusun kembali agenda serta strategi merespons perubahan agar tetap mencapai tujuan dan berdampak di tahun yang penting ini.

Ini pula yang menjadi semangat Yayasan BaKTI dan Forum KTI dalam menjalankan mandat sebagai organisasi pertukaran pengetahuan, untuk melaksanakan perhelatan penting *Road to* Festival Forum KTI sebagai rangkaian Festival Forum KTI yang baru akan digelar di tahun 2022 mendatang di Nusa Tenggara Timur. Pandemi COVID-19 tak mengurungkan niat perayaan lahirnya beragam inisiatif yang menunjukkan keberhasilan kolaborasi berbagai pihak dalam menjawab beragam tantangan pembangunan di berbagai pelosok di kawasan timur Indonesia.

"Kolaborasi menjadi kata kunci yang tak kalah penting setelah adaptasi di masa pandemi ini. Kita dituntut untuk bersinergi, bekerja sama secara kolaboratif dengan berbagai pihak, beradaptasi dalam berbagai tanggung jawab dan peran, menempatkan empati dalam melewati masa-masa penuh tantangan ini untuk meraih tujuan bersama" Prof. Dr. Ir. Hj. Winarni Monoarfa, MS Ketua Pokja Forum KTI.

Road to Festival Forum KTI yang diselenggarakan secara *online* akan mengangkat tema 'Semangat Kolaborasi untuk Indonesia' dan dilaksanakan pada 26 - 27 Oktober 2021 melalui aplikasi Zoom. Selain mengangkat enam inisiatif cerdas dari Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, dan Papua Barat, *event* ini juga menghadirkan sambutan yang mendukung pelaksanaan *Road to* Forum KTI dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A. sebagai *Keynote Speaker* Erna Witoelar – Advisory SDGs Academy Indonesia.

(Kiri) **Gestianus Sino**, Direktur CV. GS Organik Kabupaten Kupang, NTT, (Kanan), **Kristiani P. Pati**, Bendahara & Manajer Mutu CV. GS Organik Kabupaten Kupang, NTT.
Sumber : **Yayasan BaKTI**

Berikut dengan bangga kami perkenalkan keenam inisiatif cerdas yang diangkat pada perhelatan *Road to* Festival Forum Kawasan Timur Indonesia.

Pertanian Terintegrasi

Nusa Tenggara Timur memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Setidaknya ada 1,5 juta hektar lahan pertanian di daerah tersebut. Namun lebih banyak warga bumi flobamora ini memilih untuk menjadi buruh di luar negeri.

Kondisi lahan di Nusa Tenggara Timur memang cukup menantang. Lapisan tanah yang dangkal dan berbatu-batu karang membuat lahan sulit dikelola. Kondisi iklim yang kering dengan sumber air yang terbatas menambah berat tantangan pengelolaan lahan untuk pertanian di sana.

Kondisi alam yang sulit sebenarnya bisa direkayasa dengan praktik pertanian yang cerdas. Kemajuan ilmu pengetahuan dan tekonlogi telah memungkinkan pertanian di lahan yang kering dan berkarang seperti di Nusa Tenggara Timur bisa memberi hasil yang lebih baik. Namun tidak mudah untuk meyakinkan warga agar dapat mengubah pola pikir warga dalam melihat tantangan sebagai sebuah peluang menuju kesuksesan.

Praktik pertanian organik terpadu dan terintegrasi menjadi solusi yang ditawarkan oleh Gestianus Sino. Sedikit nekat, Gesti membeli lahan untuk dijadikan lahan pertanian. Lahan mulai ditata, batu karang yang menutupi sebagian besar lahan dibongkar dan dipindahkan.

Gesti mulai menata lahan seluas 1.000 meter persegi untuk kegiatan budidaya sayur dan ternak. Bersama teman-temannya di GS Organik, Gesti percaya bahwa pertanian yang baik untuk lahan kering berkarang NTT adalah pertanian organik terintegrasi.

Tidak sedikit orang yang meragukan kebun sayur Gesti. Memang, tantangan yang terbesar adalah menghadapi pesimisme orang-orang di sekitar yang menganggapnya gila karena membongkar karang. Namun Gesti selalu yakin bahwa metode pertanian yang diterapkannya ini dapat mengubah lahan berkarang tersebut menjadi lahan pertanian yang produktif.

Perlahan-lahan upaya mengelola lahan pertanian ini mulai menunjukkan hasil. Tanaman sayur tumbuh subur di atas lahan yang telah lama tertidur. Setelah beberapa kali panen sayur organik, berangsur-angsur semakin banyak pihak yang mulai melirik apa yang dikerjakan GS Organik.

Tidak sedikit pihak yang mengunjungi dan kemudian mendukung kebun GS Organik. Ada yang dari Bank Indonesia KPW Provinsi NTT, Kementerian Pertanian, Kominfo, dan

Kemendesa. Masing-masing pihak terlibat dan memberi dukungan dengan cara berbeda. Namun semua pihak telah sama-sama melihat sendiri bagaimana pola pertanian yang diterapkan GS Organik dapat menciptakan kemandirian pangan, mendatangkan manfaat ekonomi, dan tidak merusak lingkungan.

Sejauh ini kegiatan pertanian organik terintegrasi yang dilakukan sudah membawa dampak, bagi Gesti dan keluarga, tetangga dan kerabat, dan kelompok-kelompok tani dampingan.

Kegiatan ini telah menghadirkan makanan yang sehat bagi keluarga, meningkatkan ekonomi keluarga dengan menjual produk horti, ternak, serta pupuk.

Kelompok mitra dan dampingan GS Organik juga telah mempraktikan pola pertanian organik terintegrasi. Selain itu GS Organik juga memberi bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi siswa dan mahasiswa yang menjalankan magang dan PKL di kebun GS Organik

Perubahaan yang paling dirasakan Gesti bersama GS Organik adalah terbukanya kesempatan bermitra dengan lebih banyak orang dan lembaga untuk bisa mengajak orang lain mempraktikan pola pertanian organik terpadu. Tidak sedikit pelajar dan mahasiswa yang datang ke kebun GS Organik untuk mempelajari metode pertanian organik terpadu di sana.

Bagi Gesti dan GS Organik, apabila sebuah pekerjaan dilakukan secara total dan cerdas, pasti ada solusi untuk setiap permasalahan. Kreativitas dan keberanian untuk selalu berinovasi menjadi dua hal utama yang menjadi kunci sukses GS Organik dengan metode pertanian organik terintegrasi.

Yvonne M. Salindeho, Anggota Tim Pelaksana Kajian Rantai Nilai Sutra Sulawesi Selatan/Analis Kebijakan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber : **Yayasan BaKTI**

Pengetahuan untuk Kebijakan

Di Sulawesi Selatan, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dan Yayasan BaKTI melaksanakan program rintisan Penyusunan Kebijakan Berbasis Pengetahuan yang didukung oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) yang merupakan kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia. KSI didanai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) dan dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/BAPPENAS).

Melalui program ini, untuk pertama kalinya di Sulawesi Selatan, pemerintah provinsi bekerja bahu membahu dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan lembaga swadaya masyarakat untuk menghasilkan sebuah kebijakan berbasis pengetahuan setelah melalui satu siklus penyusunan kebijakan dimana suatu agenda prioritas daerah didukung melalui sebuah kajian terapan yang menjadi dasar penyusunan suatu kebijakan.

Sejak awal 2019 telah dilaksanakan serangkaian diskusi multipihak dalam rangka mengidentifikasi, menyepakati dan merekomendasikan isu prioritas yang perlu dikaji secara mendalam melalui tahapan proses *agenda setting*. Juga telah diselesaikan pelaksanaan kajian kolaborasi rantai nilai komoditas sutra berdasarkan hasil rekomendasi proses *agenda setting*. Proses advokasi dan formulasi kebijakan berdasarkan rekomendasi hasil kajian tengah berlangsung dan akan menghasilkan sebuah Peraturan Gubernur Labelisasi Sutra Sulawesi Selatan.

(Kiri) **Nurhady Sirimorok**, Anggota Tim Pelaksana Kajian Rantai Nilai Sutra Sulawesi Selatan, (Kanan), **Rahmad Sabang**, Program Koordinator Knowledge to Policy Yayasan BaKTI. Sumber : **Yayasan BaKTI**

Peraturan Gubernur Labelisasi Sutra Sulawesi Selatan menjadi sebuah produk kebijakan yang spesial karena proses penyusunannya telah menghadirkan perubahan. Jika sebelumnya penyusunan kebijakan masih lebih didasarkan pada asumsi dan belum sepenuhnya berbasis pengetahuan, maka Pergub labelisasi sutra yang baru saja ditandatangani ini lahir dari sebuah upaya kolaboratif multipihak yang melaksanakan kajian bersama mempersatukan beragam bidang keilmuan.

Melalui program rintisan pengembangan pengetahuan untuk penyusunan kebijakan ini, kita dapat melihat interaksi antar aktor dalam model ekosistem pengetahuan, di antaranya (i) *knowledge producer*, yaitu para peneliti di lembaga pemerintah, universitas dan non-pemerintah termasuk di LSM; (ii) *knowledge user*, dalam hal ini adalah pemerintah selaku penyusun kebijakan; dan (iii) *knowledge intermediaries*, yang menjembatani proses produksi pengetahuan menjadi kebijakan yang dijalankan misalnya oleh LSM seperti Yayasan BaKTI.

Selain berupaya membangun proses perumusan kebijakan yang bersandar pada hasil kajian, program ini juga mendorong keterlibatan banyak pihak dalam proses tersebut. Karena itulah pelaksanaan kajian ini melibatkan peneliti dari organisasi pemerintah daerah (Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan), organisasi non pemerintah (Yayasan BaKTI dan SRP Payo-Payo), dan para akademisi dari Universitas Hasanuddin, Makassar. Pengkajian ini kemudian berhasil membangun rancangan studi yang mengintegrasikan sejumlah kerangka analitis dari beragam perspektif berbeda, dan menyajikan laporan hasil kajian kepada pihak-pihak yang berpotensi membawanya ke proses-proses perumusan kebijakan.

Proses formulasi kebijakan berdasarkan hasil rekomendasi kajian saat ini sedang berlangsung berupa penyusunan Peraturan Gubernur Labelisasi Sutra Sulawesi Selatan. Proses pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) ini sudah berlangsung dan saat ini sedang dalam proses konsultasi ke Kemendagri. Harapannya dalam waktu dekat Peraturan Gubernur Labelisasi Sutra Sulawesi Selatan dapat ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Selatan.

Program rintisan ini masih terus berlanjut, namun sudah banyak pembelajaran yang diperoleh dari proses panjang ini. Keberhasilan memilih tema kajian dalam proses *agenda setting*, desain kajian, hasil kajian, rekomendasi kebijakan yang berhasil dirumuskan, keterlibatan para pihak di seluruh tahapan, dan berlanjutnya upaya untuk menghasilkan kebijakan berbasis pengetahuan, seluruhnya telah menghasilkan pelajaran berharga yang mungkin bisa diterapkan dalam usaha serupa di tempat-tempat lain.

(Kiri) **Abdul Asis Rahanyamtel**, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, (Kanan), **Yondri Latumanuwey**, Analis Pengembangan Aplikasi & Delivery Channel, Bank Maluku Malut, Ambon, Maluku.
Sumber : **Yayasan BaKTI**

Optimalisasi PAD Melalui Pajak dan Retribusi *Online*

Sejak tahun 2018 masyarakat Maluku Tenggara telah mengenal sebuah sistem aplikasi *online* yang berhasil mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi. Sistem aplikasi yang menggunakan alat yang disebut *Smart Register* ini dipasang di tempat-tempat usaha dan terhubung dengan semua objek pajak retribusi seperti restoran, hotel, tempat hiburan, semua objek pungutan pajak dan retribusi termasuk bandara dan terminal.

Smart Register mencatat seluruh transaksi secara *real time*. Setiap transaksi akan terbaca dalam sistem yang terhubung dengan Bapenda sehingga dapat memantau melalui *dashboard*. Bahkan sistem ini terhubung dengan perangkat Android sehingga bisa dipantau dari mana saja.

Ide menggunakan *Smart Register* ini lahir dari tekad pemerintah kabupaten Maluku Tenggara untuk mengatasi empat tantangan utama yang sebelumnya dihadapi Maluku Tenggara, yaitu belum optimalnya PAD dari pajak dan retribusi, rendahnya kesadaran membayar pajak dan retribusi, belum transparannya pengelolaan pajak dan retribusi, serta masih sulitnya pengawasan terhadap pelaku usaha.

Seluruh pihak yang terlibat, bersama-sama menjalankan kegiatan dan mensosialisasikan penggunaan aplikasi *Smart Register* kepada pelaku usaha dan masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan pendekatan persuasif, menemui pelaku usaha dan wajib pajak secara langsung. Seluruh OPD yang terlibat memberikan dukungan dalam bentuk penguatan regulasi, penyediaan anggaran, dan pelaksanaan berbagai kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sistem *online* pajak dan retribusi menggunakan aplikasi *Smart Register* berhasil meningkatkan PAD dari dari pajak restoran, rumah makan, hotel, tempat hiburan dan berbagai jenis retribusi lainnya. Selama dua tahun berjalan adalah pendapatan asli daerah terutama dari pajak hotel dan restoran mengalami peningkatan sebesar 50 hingga 100 persen per objek pajak.

Suksesnya penggunaan aplikasi *Smart Register* dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi tak lepas dari usaha kolaboratif antara Badan Pendapatan Daerah dan Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) dan berbagai OPD terkait, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Korsupgah KPK RI, dan dukungan dari kepala daerah.

Dengan pengelolaan yang kini lebih transparan, kehadiran *Smart Register* berhasil menghindarkan penyalahgunaan wewenang dan tindak korupsi di sektor pajak dan retribusi. Penggunaan sistem aplikasi *online* juga mampu mengubah perilaku ASN dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien dan bagi wajib pajak untuk mengetahui hingga membayarkan pajak kapan saja dan di mana saja dengan alat komunikasi yang dimilikinya. Selain itu, penggunaan sistem ini turut mengubah perilaku petugas dan wajib pajak/retribusi untuk memanfaatkan teknologi sehingga terjadi efisiensi pengeluaran anggaran belanja dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memantau pajak dan retribusi.

Kolaborasi Badan Pendapatan Daerah dan Bank Pembangunan Daerah Maluku berhasil menjangkau lebih banyak wajib pajak/retribusi dalam waktu yang lebih singkat. Kolaborasi ini juga melanggengkan budaya saling mendukung untuk kemajuan bersama dimana semua pihak yang terlibat bisa saling mengisi dan melengkapi mengatasi masalah yang ditemui sesulit apapun itu sembari mengikis ego sektoral antar OPD maupun antara daerah.

Dari waktu ke waktu semakin banyak dampak positif yang sangat dirasakan di tengah tuntutan pembangunan terus meningkat. Selain terus mengoptimalkan penggunaan aplikasi *online* untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui lebih banyak sumber, penggunaan aplikasi *online* juga menjadi terobosan awal untuk pemanfaatan teknologi dalam berbagai bidang lainnya sebagai bagian dari pembenahan sistem kerja dan budaya kerja yang selama ini masih bersifat manual.

Sejahtera dengan Perencanaan Pembangunan Kampung yang Sinergis

Tantangan permasalahan layanan dasar di Papua dan Papua Barat dirasa belumlah cukup tertangani hanya dengan upaya peningkatan kapasitas unit layanan dan kampung.

Tampak bahwa persoalan kesehatan dan pendidikan yang terjadi sebagian besar adalah persoalan yang berulang dari tahun-tahun sebelumnya. Namun metode penanganan yang dilakukan pun masih sama di setiap tahunnya. Oleh karena itu, perlu ada perubahan pada pola kerja dan perencanaan.

Belajar dari kondisi yang terjadi ini, ide untuk membangun sinergi antara kampung dan unit layanan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk menghadapi masalah-masalah kesehatan maupun pendidikan di masyarakat muncul dan mulai dikembangkan.

Bersinergi dalam hal ini adalah memadukan upaya dan sumber daya yang dimiliki antara

(Kiri) **Yacobus Frits Ramar**, Kepala Distrik Oransbari, Manokwari Selatan, Papua Barat, (Tengah), **Herlina Sopia Silubun**, Guru SD YPPK St. Martinus de Pores, Ayam, Asmat, Papua dan (Kanan), **Ricky Djodjobo**, M&E Manager Program LANDASAN Fase II. Sumber : **Yayasan BaKTI**

kampung dan unit layanan dasar kesehatan dan pendidikan untuk menjawab permasalahan yang dialami bersama-sama. Membangun sinergi bersama dengan pihak-pihak yang telah memperoleh peningkatan kapasitas sebelumnya, diyakini dapat memberikan dampak yang lebih luas dalam menghadapi permasalahan layanan dasar.

Sinergi perencanaan adalah sebuah model yang diperkenalkan Program KOMPAK - LANDASAN di 8 Kabupaten di Papua dan Papua Barat. Model sinergi perencanaan mendorong kerja sama antar unit pemerintahan, termasuk unit layanan, untuk saling mengisi dan melengkapi dalam upaya bersama membangun sebuah rencana agar pelaksanaan pelayanan dasar khususnya bidang kesehatan dan pendidikan dapat lebih cepat mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Dengan demikian, rencana yang disusun oleh unit-unit yang berbeda namun beroperasi di wilayah yang sama dapat saling terhubung dan saling mendukung saat mengatasi permasalahan.

Jika selama ini kampung dan unit layanan membuat perencanaan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri-sendiri, maka dalam sinergi perencanaan ini, kampung dan unit layanan bekerja sama mulai dari tahap perencanaan. Kehadiran unit layanan ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah kerja unit layanan tersebut berada. Upaya dari unit layanan akan memberikan hasil yang lebih efektif bagi masyarakat manakala masyarakat juga turut melakukan peran mereka untuk mendukung tercapainya hasil yang diharapkan.

Dalam konsep bersinergi, puskesmas sebagai unit layanan dasar kesehatan dan sekolah sebagai unit layanan dasar pendidikan turut berperan membantu menyelesaikan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh kampung. Sebaliknya, kampung mengambil peran membantu upaya puskesmas dalam mengatasi persoalan kesehatan yang dialami masyarakat. Kampung dan masyarakat juga turut berperan membantu upaya sekolah mengatasi persoalan pendidikan yang dihadapi oleh sekolah dalam upaya mencerdaskan anak-anak di kampung tersebut. Masing-masing sektor melakukan peran mereka yang tidak dapat dilakukan sektor lainnya untuk mencapai hasil yang diharapkan bersama.

Dalam konteks pembangunan di Papua dan Papua Barat, sangat sulit menemukan kampung yang membuat perencanaannya secara mandiri terlebih melakukan perencanaan secara bersinergi. Sambutan baik diperoleh di berbagai kabupaten dampingan Program KOMPAK-LANDASAN Fase II di antaranya Manokwari Selatan, Fakfak, Sorong, Kaimana, Jayapura, Nabire, Asmat dan Boven Digoel.

Melalui sinergi perencanaan dapat unit pemerintah menghasilkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat. Adanya pertemuan antara kampung dan unit layanan ini menjadi kesempatan untuk memaparkan data, menganalisa dan membahas solusinya bersama-sama sehingga program yang direncanakan pun berdasarkan dengan permasalahan dan kebutuhan di masing-masing unit layanan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Karena itu, poin penting untuk berjalannya konsep ini sendiri adalah komitmen dari pemerintah daerah.

Apa yang dilakukan oleh KOMPAK-LANDASAN bukanlah mengubah proses

perencanaan yang selama ini telah berjalan, melainkan mencoba mengaitkan antara perencanaan di masing-masing unit layanan dan kampung. Pertama-tama dengan mengkaji alur perencanaan pada masing-masing unit layanan dan kampung, kemudian mencari celah di mana proses sinergi perencanaan ini dapat dimasukkan. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh puskesmas dan sekolah yang memiliki keterkaitan dengan masyarakat itu dapat terhubung pada proses yang pas. Sehingga ada pelibatan masyarakat pada proses tertentu dalam perencanaan unit layanan, dan ada pelibatan unit layanan dalam proses perencanaan kampung.

Berjalannya perencanaan yang bersinergi antara pemerintah kampung dan unit penyedia layanan kesehatan dan pendidikan adalah pertama kalinya di Papua dan Papua Barat yang dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia.

Posyandu Prakonsepsi Satu Tahap Lebih Dulu

Posyandu Prakonsepsi adalah pelayanan pada bagi pasangan usia subur dan ingin mendapatkan keturunan yang meliputi pelayanan kesehatan reproduksi dan perbaikan gizi sebelum konsepsi atau pembuahan terjadi.

(Kiri) **dr. Anang S. Otoluwa**, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, (Kanan) **drg. Sri Dewi Susanti**, Kepala Puskesmas Kampung Baru Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Sumber : **Yayasan BaKTI**

Posyandu Prakonsepsi di Banggai lahir dalam usaha menjawab berbagai masalah kronis serius di Kabupaten Banggai seperti tingginya angka kematian ibu (AKI), cukup banyaknya anak balita dengan tubuh pendek atau *stunting*, dan tingginya penyakit tidak menular yang kini mendominasi penyebab kematian di Indonesia. Oleh karenanya Posyandu Prakonsepsi bertujuan meningkatkan status kesehatan calon ibu, mengurangi perilaku, faktor individu, lingkungan yang dapat memperburuk kesehatan ibu dan anak, serta memperbaiki kondisi kesehatan ibu dan anak.

Terdapat tujuh kegiatan inti dalam Posyandu Prakonsepsi. Ketujuh kegiatan itu dimulai dengan rekrutmen wanita prakonsepsi, kelas prakonsepsi, pengukuran status gizi calon ibu, pengukuran lingkar lengan atas dan lingkar panggul, pemeriksaan tekanan darah, pengukuran hemoglobin, dan pemberian suplemen tablet penambah darah atau multi gizi mikro.

Posyandu Prakonsepsi masih terbilang baru di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banggai. Dibutuhkan peran lintas sektor serta dukungan masyarakat untuk mendukung dan memastikan manfaatnya. Oleh karena itu, beragam aktivitas advokasi kepada *stakeholders* tingkat kabupaten, kecamatan, dan selanjutnya tingkat desa

(Kiri) **Mansetus Balawala**, Direktur Yayasan Kesehatan untuk Semua Flores Timur, NTT, (Kanan) **Maria Goreti Ruron**, Bidan Puskesmas Lewolema Desa Riangkotek, Flores Timur, NTT.
Sumber : **Yayasan BaKTI**

dilakukan untuk memperkenalkan gagasan Posyandu Prakonsepsi.

Sosialisasi dilakukan pertama-tama dalam lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai lalu ke berbagai instansi terkait antara lain Kantor Kementerian Agama, TP-PKK Kabupaten Banggai, Universitas Hasanuddin, kepala desa/lurah, bidan desa, dan KUA. Dalam sosialisasi disampaikan beragam permasalahan kesehatan yang ada di Puskesmas Kampung Baru dan gagasan mengenai peran yang diharapkan dari masing-masing pihak yang terlibat.

Sejak pertama kali diperkenalkan, kehadiran Posyandu Prakonsepsi telah membawa perubahan yang besar di Kabupaten Banggai. Kunjungan pemeriksaan ibu hamil dan jumlah persalinan di fasilitas kesehatan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Angka kematian ibu melahirkan pun berangsur menurun.

Selain itu karena jumlah kunjungan pemeriksaan ibu hamil mengalami peningkatan, tenaga kesehatan bisa mengenal lebih dekat ibu hamil yang memeriksakan diri. Dengan demikian, tenaga kesehatan lebih mudah berdiskusi dengan ibu hamil mengenai beragam informasi terkait persiapan melahirkan dan penanganan kondisi medis yang diperlukan.

Tidak sedikit tantangan yang dihadapi dalam mengelola Posyandu Prakonsepsi di Kabupaten Banggai. Tidak semua calon ibu hamil memiliki disiplin yang sama dalam mengkonsumsi makanan bergizi dan obat-obat penambah darah yang dianjurkan. Di masa pandemi, saat kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat diberlakukan, aktivitas posyandu pun harus melakukan beberapa adaptasi, termasuk mengunjungi ibu hamil peserta Posyandu Prakonsepsi dari rumah ke rumah.

Jika Posyandu Prakonsepsi dapat terus dijalankan maka di masa depan semakin banyak ibu hamil yang menerima layanan berupa pemeriksaan dan pemantauan kehamilan berkala serta berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mempersiapan kelahiran. Semakin banyak bayi yang lahir dengan kondisi sehat untuk kemudian menjadi generasi sehat, anak cerdas, dewasa produktif dan lansia bahagia.

Melayani Kebutuhan Kesehatan Flores Timur

Dalam sebuah seminar yang diselenggarakan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Flores Timur, dan dihadiri semua *stakeholders* di tahun 2006 silam, banyak kisah miris perjuangan para medis Flores Timur terungkap. Satu di antaranya adalah perjuangan mereka ketika merujuk pasien dari pulau Solor dan Adonara ke rumah sakit rujukan yang berpusat di Larantuka.

Bagi mereka, bukanlah masalah bila alam sedang bersahabat. Namun tidak demikian ketika gelombang laut mengganas di antara bulan Desember hingga Maret. Sebagai manusia, nyali paramedis juga ciut menghadapi gempuran gelombang laut selat Gonsalu ketika merujuk pasien. Apalagi fasilitas keselamatan kapal terbatas.

Kabupaten Flores Timur adalah sebuah kabupaten kepulauan. Sarana transportasi laut adalah satu-satunya yang menghubungkan warga untuk menuju ibu kota kabupaten di mana terdapat rumah sakit rujukan daerah. Jumlah kasus rujukan ke rumah sakit tersebut terbilang cukup tinggi. Pada tahun 2019 jumlah rujukan dari 11 wilayah kecamatan yang ada di pulau Adonara dan Solor mencapai 4.280 kasus.

Selama ini masyarakat hanya dapat mengandalkan kapal angkutan umum saat dirujuk ke rumah sakit. Tidak sedikit kasus ibu melahirkan di atas kapal dengan fasilitas seadanya di antara para penumpang. Dan di musim ombak besar, warga cenderung memilih pasrah tinggal di rumah dan tidak melanjutkan pengobatan. Akibatnya angka kesakitan dan kematian di Flores Timur melonjak pada waktu-waktu tertentu.

Kesulitan yang dihadapi para tenaga medis ini sudah berulang kali disampaikan kepada pengambil kebijakan agar mengambil langkah konkrit dalam mengatasi persoalan ini. Walaupun demikian harapan para bidan yang diwakili bidan Ida ini belum bisa dipenuhi pemerintah karena minimnya anggaran daerah. Permintaan bidan Ida ini memantik YKS untuk ikut berjuang memenuhi harapan bidan Ida dan para Nakes lainnya yang bekerja di wilayah kepulauan.

Kiprah YKS dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dimulai sejak pertengahan tahun 2002 dengan mengembangkan Program Manajemen Kerusakan Minimum Sepeda Motor untuk pelayanan kesehatan di pedesaan Flores Timur atau lebih dikenal dengan Ambulans Motor. Dalam perjalanan program, YKS juga melihat banyak puskesmas memiliki armada mobil ambulans yang terbatas. Setiap Puskesmas hanya memiliki satu unit mobil ambulans. Itu pun ada yang kondisinya sangat memprihatinkan karena sudah termakan usia.

Persoalan ini sering menjadi keluhan masyarakat, ketika membutuhkan mobil ambulans untuk mengantar pasien rujukan ke pelabuhan yang menjadi titik penyeberangan menuju rumah sakit rujukan. Sejumlah armada sepeda motor dioperasikan untuk memfasilitasi petugas kesehatan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan berjalan sukses saat ini.

Pada tahun 2019 YKS bekerja sama Kedutaan Jepang di Indonesia untuk mengadakan Ambulans Laut. Ambulans laut adalah perahu cepat yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan standar yang memungkinkan pasien rujukan merasa nyaman selama perjalanan. Kehadiran ambulans laut ini juga memangkas waktu tempuh agar pasien rujukan terutama yang bersifat kedaruratan, lebih cepat mendapat penanganan medis untuk menekan angka kematian akibat terlambat mendapatkan penanganan.

Selain bekerja sama dengan Kedutaan Jepang di Indonesia, YKS juga bekerja sama dengan Overland Magazine melalui Motorcycle Outreach dan Shell Advance, untuk menambah tiga unit mobil ambulans bagi tiga puskesmas yakni Puskesmas Waiwadan, Puskesmas Lite dan Puskesmas Baniona. Dalam kerja sama ini, juga dilakukan penambahan 15 unit sepeda motor Honda CRF 150 untuk meregenerasi sepeda motor yang dioperasikan sebelumnya guna melayani masyarakat di lima kecamatan yakni, Solor Barat, Wotan Ulumado, Adonara Tengah, Adonara Barat dan Lewolema.

Untuk mendukung seluruh program ini, YKS mendirikan sebuah bengkel yang menjadi pusat pemeliharaan semua kendaraan yang dioperasikan untuk pelayanan kesehatan di lapangan. Selain, bengkel motor ini juga dibuka untuk umum. Dana yang didapat dari usaha ini digunakan kembali untuk biaya operasional program.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Road to Forum KTI, silahkan kunjungi **www.bakti.or.id**

Satu Tahun PROSPPEK-OTSUS di Papua Barat

Oleh
HALIA ASRIYANI

Setelah diresmikan pada November 2020, hingga kini pelaksanaan Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung-Otonomi Khusus (PROSPPEK-OTSUS) terus berlangsung di wilayah Provinsi Papua Barat. PROSPPEK-OTSUS merupakan inisiatif bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Papua Barat sebagai bentuk implementasi otonomi khusus di Provinsi Papua Barat. PROSPPEK-OTSUS bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kampung, kelurahan dan distrik dalam bidang ekonomi maupun pelayanan dasar, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP) yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS). Hal ini dipertegas dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua Barat Nomor 2 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa sebagian dana OTSUS Papua Barat dialokasikan untuk PROSPPEK-OTSUS.

PROSPPEK-OTSUS adalah salah satu inisiatif program yang selaras dan mendukung kebijakan dan program nasional dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan mempercepat pembangunan kampung

SAIK+ adalah aplikasi yang dibutuhkan program PROSPPEK-OTSUS agar dana OTSUS dapat disalurkan dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat terutama Orang Asli Papua (OAP), mengingat SAIK+ menyediakan informasi akurat mengenai setiap penduduk dalam satu wilayah, maka dengan data SAIK+, informasi mengenai penduduk OAP dalam satu wilayah dapat diperoleh.

di seluruh Provinsi Papua Barat. Program ini sendiri terdiri dari empat komponen yaitu (1) penguatan Sistem Informasi dan Administrasi Kampung; (2) peningkatan kapasitas kader dan aparatur pemerintah kampung; (3) penguatan distrik dalam melaksanakan Binwas terhadap kampung; serta (4) penguatan sinergi bidang pembangunan di kampung. Melalui keempat komponen program ini, diharapkan kampung dapat mengelola dan menggunakan anggaran ke kampung menjadi lebih efektif dan berhasil guna sesuai dengan tujuan nasional dan kebutuhan kampung, khususnya bagi OAP.

PROSPPEK-OTSUS sendiri telah secara resmi mereplikasi program Sinergi Perencanaan dan Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+) di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat. Sinergi Perencanaan merupakan program yang melibatkan kampung dan unit layanan dasar kesehatan dan pendidikan dalam menyusun perencanaan mereka bersama-sama agar dapat saling berkolaborasi dalam memecahkan permasalahan kesehatan dan pendidikan di tingkat kampung. Sedangkan SAIK+ merupakan sebuah sistem database elektronik yang memuat data kependudukan, sosial dan ekonomi setiap penduduk dalam satu kampung.

Kedua program ini, sinergi perencanaan dan SAIK+, merupakan program yang dijalankan oleh

Serah Terima Akun SAIK+ dari Provinsi Papua Barat ke Pemerintah Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat
Foto : **Dok. LANDASAN / Yayasan BaKTI**

KOMPAK-LANDASAN yang telah bekerja sejak tahun 2017 untuk peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar berkualitas di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Hingga tahun 2021 ini, KOMPAK-LANDASAN telah bekerja di empat kabupaten untuk Provinsi Papua Barat yaitu Manokwari Selatan, Sorong, Kaimana dan Fakfak. Keempat kabupaten tersebut pun menjadi kabupaten percontohan program PROSPPEK-OTSUS yang melibatkan tim KOMPAK-LANDASAN dalam pelaksanaannya.

Menyiapkan Sistem Informasi dan Administrasi Kampung

Setelah berjalan kurang lebih selama satu tahun, program PROSPPEK-OTSUS ibaratnya masih merangkak. Sejumlah kegiatan dilakukan untuk bergerak tahap demi tahap agar mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satunya adalah melatih kader kampung agar dapat menyiapkan

Foto: Dok. KOMPAK-LANDASAN II

data SAIK+ yang dilakukan pada Februari-Maret 2021. SAIK+ adalah aplikasi yang dibutuhkan program PROSPPEK-OTSUS agar dana OTSUS dapat disalurkan dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat terutama Orang Asli Papua (OAP). Mengingat SAIK+ menyediakan informasi akurat mengenai setiap penduduk dalam satu wilayah, maka dengan sata SAIK+, informasi mengenai penduduk OAP dalam satu wilayah dapat diperoleh. Hal ini akan sangat menunjang kebutuhan program PROSPPEK-OTSUS yang memang dikhususkan bagi OAP. Pelatihan Kader SAIK+ ini difasilitasi oleh tim KOMPAK-LANDASAN Fase II yang dilakukan untuk semua kader kampung yang ada di empat kabupaten yaitu Manokwari Selatan, Kaimana, Sorong dan Fakfak.

Sebagaimana komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat, untuk tahun anggaran 2020 menyalurkan bantuan sebesar 250 juta rupiah per kampung di 1.742 kampung, 150 juta rupiah per kelurahan di 95 kelurahan dan 100 juta rupiah/distrik di 218 distrik telah dilaksanakan. Dana tersebut oleh kampung dimanfaatkan salah satunya untuk mendukung penyiapan SAIK+, misalnya dana operasional kader dalam melakukan pendataan dan penginputan data, termasuk menyediakan alat atau perangkat yang diperlukan dalam menyiapkan SAIK+ ini.

Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen penuh dengan terus berupaya merancang dan melaksanakan program-program prioritas yang didukung dana OTSUS secara inovatif dan kontekstual Papua Barat untuk akselerasi pembangunan. Dalam perkembangannya, program PROSPPEK-OTSUS juga mendukung Program Afirmasi Perlindungan OAP atau Perlindungan Sosial (Perlinsos). Program ini akan mendukung perbaikan gizi dan kesejahteraan Orang Asli Papua, khususnya anak-anak usia lima tahun ke bawah dan para lansia berusia 60 tahun ke atas. Untuk itulah keberadaan data SAIK+ pun sangat dibutuhkan untuk memperoleh informasi terpilah OAP berdasarkan usia masing-masing. Dengan begitu, pelaksanaan program Perlinsos dapat diterima dan dimanfaatkan oleh orang yang tepat.

Foto: Dok.KOMPAK-LANDASAN II

Serah Terima Akun SAIK+ dari Provinsi Papua Barat ke Pemerintah Kabupaten Sorong.
Foto : **Dok. LANDASAN / Yayasan BaKTI**

Membentuk dan Melatih Tim Sekber Provinsi hingga Kabupaten

Dalam menjalankan program PROSPPEK-OTSUS ini sendiri, dibentuk Tim Sekretariat Bersama (Sekber) yang ada di tingkat provinsi dan masing-masing kabupaten. Tim Sekber berfungsi untuk mengarahkan, mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan kebijakan dan strategi PROSPPEK-OTSUS. Tim Sekber ini terdiri dari perwakilan lintas organisasi perangkat daerah, termasuk kepala-kepala distrik yang memiliki tupoksi yang berkaitan dengan program ini.

Tim Sekber Provinsi telah lebih dulu dibentuk dan mengikuti kegiatan *Training of Trainers* (ToT) yang dilakukan pada awal tahun 2021 untuk menyiapkan tim pelatih atas tiga komponen PROSPPEK-OTSUS di masing-masing kabupaten. Ketiga komponen tersebut adalah penguatan Sistem Informasi dan Administrasi Kampung; penguatan distrik dalam melaksanakan BINWAS terhadap Kampung; serta penguatan sinergi bidang pembangunan di kampung.

Selanjutnya, pada September 2021, setelah tim Sekber di empat kabupaten telah terbentuk, dilakukan pula ToT untuk tim Sekber Kabupaten. ToT ini dilaksanakan di empat wilayah dampingan program KOMPAK-LANDASAN. ToT ini bertujuan untuk memberikan penambahan kapasitas kepada Tim Sekber dalam mengawal dan memfasilitasi jalannya program PROSPPEK-OTSUS di kabupaten, terutama memahami SAIK+ yang menjadi salah satu komponen dari PROSPPEK-OTSUS. ToT yang telah dilakukan untuk kader kampung, dan yang baru dilakukan pula untuk tim Sekber Kabupaten, adalah pemenuhan dua komponen dari empat komponen PROSPPEK OTSUS yaitu penguatan Sistem Informasi dan Administrasi Kampung serta peningkatan kapasitas kader dan aparatur pemerintah kampung. Pelatihan ini pun difasilitasi oleh tim Sekber Provinsi yang telah dilatih sebelumnya dengan didampingi oleh tim KOMPAK-LANDASAN.

Para Tim Sekber Kabupaten yang telah dilatih ini pun diharapkan dapat menjadi *trainer* yang dapat memfasilitasi kampung dan distrik di wilayahnya dalam hal pengelolaan SAIK+. Untuk mewujudkan hal tersebut, pelaksanaan ToT Sekber ditutup dengan serah terima pengelolaan akun SAIK+ dari tim Sekber Provinsi Papua Barat kepada tim Sekber masing-masing kabupaten. Diharapkan dengan dikelolanya akun SAIK+

Foto: Dok. KOMPAK-LANDASAN II

di masing-masing kabupaten, tim Sekber Kabupaten pun mampu mengelola secara mandiri dan memantau jalannya SAIK+ hingga tingkat distrik dan kampung di wilayah masing-masing.

Rapat Evaluasi PROSPPEK-OTSUS

Pada September 2021 juga dilakukan Rapat Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut Program PROSPPEK-OTSUS. Hasil monitoring dan audit pelaksanaan PROSPPEK-OTSUS tahun 2020 pun merekomendasikan perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaannya sehingga dibutuhkan perubahan dalam Peraturan Gubernur dan Pedoman Umum yang sudah ada. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat selanjutnya melakukan Rapat Koordinasi Sekber di tingkat kabupaten. Tim KOMPAK-LANDASAN memfasilitasi jalannya Rapat Koordinasi Sekber PROSPPEK-OTSUS di empat kabupaten dampingan program yaitu Manokwari Selatan, Sorong, Kaimana dan Fakfak. Koordinasi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menyepakati rencana tindak lanjut pelaksanaan program PROSPPEK-OTSUS di masing-masing wilayah.

Selain penguatan Sistem Informasi dan Administrasi Kampung serta peningkatan kapasitas kader dan aparatur pemerintah kampung, dua komponen lain dari PROSPPEK-OTSUS yaitu penguatan distrik dalam melaksanakan Binwas terhadap Kampung dan penguatan sinergi bidang pembangunan di kampung pun telah direncanakan di empat kabupaten ini untuk perencanaan tahun 2022. Bahkan sejumlah kampung dan distrik di luar wilayah dampingan program pun telah mengalokasikan dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Perlahan, PROSPPEK-OTSUS pun mulai menemukan jalan untuk mewujudkan empat komponen yang menjadi pilar bagi tujuan utama yaitu pembangunan di kampung/ kelurahan dan distrik dalam bidang ekonomi maupun pelayanan dasar.

Setelah satu tahun, masih banyak pekerjaan rumah bagi setiap pihak yang terlibat dalam PROSPPEK-OTSUS ini, mulai dari kader kampung, pemerintah kampung hingga kabupaten juga pemerintah provinsi, termasuk pula bagi KOMPAK-LANDASAN sebagai mitra yang mendukung jalannya program ini. Harapannya, upaya untuk belajar merangkak selama satu tahun ini bisa menjadikan program PROSPPEK-OTSUS berjalan dengan lebih baik di masa depan. Berjalan menuju kesejahteraan OAP yang ada di Papua Barat seperti yang dicita-citakan bersama.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KOMPAK-LANDASAN Fase II, dapat menghubungi **info@bakti.or.id**

BELAJAR DARI PROSES KAJIAN KOLABORATIF RANTAI NILAI SUTRA

Bagian I

Oleh **NURHADY SIRIMOROK**

Pada Juli 2020 hingga Januari 2021, sekelompok peneliti mengerjakan kajian tentang rantai nilai *(value chain)* komoditas sutra Sulawesi Selatan. Tim peneliti ini menjalankan satu bagian dari program rintisan penyusunan kebijakan berdasarkan pengetahuan atau *Knowledge to Policy Pilot* (K2P), kerjasama antara *Knowledge Sector Initiative* (KSI), Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Yayasan BaKTI, dan SRP Payo-Payo.

Selain berupaya membangun proses perumusan kebijakan yang bersandar pada hasil kajian, K2P juga ingin mendorong keterlibatan

Foto: Dok. Yayasan BaKTI

banyak pihak dalam proses tersebut. Karena itulah, kajian ini melibatkan peneliti dari organisasi pemerintah daerah (Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan), organisasi non pemerintah (Yayasan BaKTI dan SRP Payo-Payo), dan para akademisi dari Universitas Hasanuddin, Makassar.

Pengkajian ini kemudian berhasil membangun rancangan studi yang mengintegrasikan sejumlah kerangka analitis dari beragam perspektif berbeda, dan menyajikan laporan hasil kajian kepada pihak-pihak yang berpotensi membawanya ke proses-proses perumusan kebijakan. Bagaimana semua capaian itu dapat diperoleh?

Tulisan ini menyajikan secara berurutan proses-proses utama dalam pelaksanaan uji coba program penyusunan kebijakan berbasis kajian, sejak rangkaian kegiatan *agenda setting*, pelaksanaan kajian, sampai kerja-kerja advokasi berupa penyajian hasil kajian kepada pihak-pihak terkait dalam upaya mendorong penggunaan rekomendasi kajian menjadi kebijakan. Tulisan ini juga menyajikan sejumlah pembelajaran yang diperoleh dari rangkaian kerja tersebut. Walaupun belum memuat seluruh elemen yang perlu diketahui dalam kajian kolaboratif semacam ini, setidaknya tulisan ini menyajikan aspek dan isu yang paling penting menurut pandangan berbagai pihak khususnya para anggota Tim Pelaksana Kajian (TPK).

Agenda setting: memilih tema kajian dan membangun komitmen

Membangun komitmen pemerintah lokal, itulah langkah dan syarat pertama dalam menjalankan uji coba perumusan kebijakan berbasis pengetahuan. Untuk itu, berbagai pihak yang terlibat perlu melewati proses dialog dan negosiasi melalui proses *agenda setting* yang berlangsung lewat lima kali pertemuan antara pihak-pihak terkait. Dari rangkaian inilah pihak-pihak yang terlibat memutuskan untuk mengkaji dua komoditas: sutra dan talas satoimo, dan menjadikan sutra sebagai prioritas untuk dikaji pada tahun pertama.

Seleksi tema kajian butuh pembentukan kriteria seleksi, dan untuk itu para peserta senantiasa menimbang relevansi isu tersebut dalam beberapa aspek. Pertama, relevansinya bagi masyarakat, yaitu keberadaan sejumlah persoalan nyata dalam tema yang akan dikaji. Kedua, kesesuaian dengan kebutuhan kebijakan, dalam arti pemerintah butuh satu kajian komprehensif untuk menjawab persoalan tersebut yang akan dirumuskan dalam suatu kebijakan, namun kajian semacam itu belum tersedia. Ketiga, kesesuaian dengan prioritas perencanaan pembangunan provinsi, dalam kasus ini tema kajian yang dipilih sesuai dengan isu prioritas dalam RPJMD pemerintah provinsi berjalan. Terakhir, keempat, metode pelaksanaan dan tema kajian sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Pada pertemuan akhir dari rangkaian ini pula seluruh pihak sepakat untuk menjalankan kajian

Proses agenda setting berlangsung dalam beberapa kali pertemuan antara berbagai pihak yang terkait untuk menyepakati dan mengkaji komoditas yang menjadi prioritas. Foto: **Dok. Yayasan BaKTI**

secara kolaboratif. Kerja kolaboratif K2P ini disambut baik oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Bappelitbangda Sulawesi Selatan yang memang sedang mencari jalan untuk melibatkan lebih banyak pihak dalam pelaksanaan kajian untuk perumusan kebijakan. Selain sebagai ajang pengembangan kapasitas para staf, Bappelitbangda juga membayangkan kerja kolaboratif semacam ini bisa menghimpun perspektif lebih luas. Lebih beragamnya disiplin ilmu dan pihak yang terlibat akan menghasilkan kajian yang lebih bermutu dan komprehensif.

Keanekaragaman pihak yang terlibat selama rangkaian pertemuan *agenda setting* juga merupakan unsur penting dalam membangun komitmen. Sejak pertemuan pertama organisasi pemerintahan daerah, akademisi, peneliti, pihak swasta dan ornop sudah terlibat aktif. Rangkaian pertemuan dan kesepakatan ini sangat penting untuk menciptakan rasa kepemilikan *(sense of ownership)* terhadap proses K2P, sesuatu yang penting dalam membangun komitmen seluruh pihak yang terlibat. Komitmen ini pada gilirannya akan memudahkan proses kerja pada tahap-tahap selanjutnya.

Sebuah kerja kolaboratif senantiasa butuh koordinasi intensif yang dalam kasus kajian ini berlangsung dalam rentang proses yang lumayan panjang–selama enam bulan. Kelambanan respons dari satu pihak saja akan menghambat kelancaran dan keberhasilan kerja kajian. Apabila itu berlangsung pada tahap awal maka mutu dan bahkan kelanjutan kajian akan terancam, terutama dalam konteks pandemi COVID-19 ketika pertemuan tatap muka sulit diadakan.

Membentuk Tim Pelaksana Kajian dan Tim Pengendali Mutu

Proses pelaksanaan kajian ini mengadopsi dua aspek mendasar dari Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Pertama, mengadopsi istilah 'kajian' untuk menyebut kerja kolaboratif ini. Permendagri No. 17/2006 menyebutkan ragam kegiatan kelitbangan, di antaranya penelitian dan pengkajian. Penelitian didefinisikan sebagai upaya menguji hipotesis menggunakan kaidah akademis, sedangkan pengkajian merujuk pada penelitian terapan untuk memecahkan masalah. Eksperimen ini dengan sengaja memilih istilah pengkajian daripada penelitian, karena tujuan utamanya adalah membantu memecahkan masalah pengembangan komoditas sutra Sulawesi Selatan.

Kedua, kajian ini mengadopsi kelengkapan struktur tim yang terlibat dalam proses persiapan dan pelaksanaan kajian, yaitu: Tim Persiapan, Tim Pengawas, Tim Pelaksana Kajian (TPK), dan Tim Pengendali Mutu (TPM). Dalam kajian ini, Tim Persiapan terdiri dari Bidang Litbang Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dan Yayasan BaKTI, sedangkan Tim Pengawas terdiri dari Bidang Litbang Bappelitbangda, Yayasan BaKTI, dan KSI. Sementara itu, TPK berisi sekelompok peneliti yang mengerjakan seluruh

Foto: Dok.KOMPAK-LANDASAN II

rangkaian kerja kajian, dan TPM beranggotakan sekelompok peneliti berpengalaman yang membaca dan memberi masukan-masukan kritis kepada TPK sejak dari rumusan desain sampai laporan hasil kajian.

Sebagai uji coba pelaksanaan kajian kolaboratif, TPK rantai nilai sutra Sulawesi Selatan berisi akademisi, pegiat organisasi non-pemerintah (ornop), dan staf Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara TPM berasal dari para akademisi dan pegiat ornop yang punya pengalaman panjang di bidang penelitian, advokasi, dan pengembangan masyarakat.

Akhirnya, pihak-pihak penggagas kajian juga mengambil kesepakatan penting dalam hal pelaksanaan kajian: menjadikan ornop lokal (dalam kasus ini SRP Payo-Payo) sebagai Organisasi Pelaksana Kajian (OPK). Sebagai eksperimen para pihak mencapai kesepakatan ini, menunjuk ornop lokal sebagai pengelola kajian, dengan alasan bahwa ornop lazimnya sudah terbiasa melakukan kerjasama dengan individu dan organisasi yang beraneka ragam. Karena itu, mereka cenderung lebih terbuka bekerja sama dalam tim (kajian) yang berisikan individu yang berbeda latar belakang.

Dalam proses perekrutan dua tim ini, beberapa aspek perlu diperhatikan. Pertama, keahlian dan pengalaman anggota tim. Bergantung pada subyek kajian, anggota TPK perlu menguasai aspek-aspek terpenting dari perspektif yang mereka bawa. Anggota tim tidak harus ahli dalam banyak bidang kajian tetapi cukup punya pengetahuan tentang tema yang akan diteliti dari perspektif yang mereka wakili. Dalam kajian rantai nilai komoditas sutra Sulawesi Selatan, misalnya, peneliti yang mewakili perspektif gender perlu menguasai beragam alat analisis dari kajian gender dan dapat menerapkannya kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penelitian.

Kedua, keberagaman. Sebuah penelitian untuk kebijakan akan mendapat manfaat besar dengan memilih anggota TPK dan TPM yang berasal dari beraneka bidang ilmu pengetahuan. Setiap isu publik, yang melibatkan banyak orang di dunia nyata, selalu merupakan fenomena rumit yang sulit didalami secara memadai dari sudut pandang tertentu saja. Keanekaragaman disiplin ilmu anggota TPK memastikan sebanyak mungkin aspek yang melingkupi tema kajian akan diteliti. Sebagai gambaran, dalam penelitian rantai nilai sutra, anggota tim diisi oleh peneliti sutra, gender, pemberdayaan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan rantai nilai komoditas. Ketiga, keanekaragaman membutuhkan keterbukaan untuk menerima pandangan berbeda dari seluruh anggota TPK dan TPM. Khusus bagi TPK, terutama dalam tahap-tahap awal ketika anggota TPK baru mulai mengenali perspektif masing-masing, keterbukaan terhadap pandangan berbeda sangat dibutuhkan agar setiap peneliti bersedia mendengar dan menyerap aspek-aspek relevan bagi kajian yang

Bersama PLT Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. TPK rantai nilai sutra ini beranggotakan akademisi, pegiat organisasi non pemerintah dan staf Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Foto: **Dok. Yayasan BaKTI**

disampaikan anggota tim lain. Keterbukaan semacam ini tentu bisa diketahui dari jejak rekam para anggota dalam hal bekerja bersama anggota tim peneliti yang berasal dari disiplin ilmu atau kelompok epistemik berbeda.

Keempat, setidaknya satu orang anggota TPK menguasai sebagian aspek dari tema spesifik yang akan dikaji. Dari pengalaman kajian rantai nilai sutra, keberadaan seorang anggota yang sudah lebih dua dekade meneliti sutra di Sulawesi Selatan sangat membantu kerja tim sejak penyusunan desain kajian sampai penulisan laporan akhir. Anggota tim semacam ini dapat mengingatkan tentang aspek-aspek tertentu dari tema yang mungkin luput diperhatikan dalam penyusunan desain kajian, semisal menceritakan aspek-aspek historis perkembangan sutra di Sulawesi Selatan untuk dipertimbangkan oleh anggota TPK lain. Anggota ahli seperti ini juga bisa memudahkan menemukan narasumber (yang sudah ia kenal pada penelitian sebelumnya), atau daerah spesifik yang dituju dalam penelitian lapangan (di mana ia sudah pernah meneliti, atau ia rencanakan untuk diteliti berbasis temuan-temuan sebelumnya). Anggota ahli juga bisa memastikan kebenaran penggunaan istilah-istilah spesifik dalam penulisan laporan. Ada banyak kerja yang tak perlu berulang dengan keberadaan anggota ahli.

Kelima, setidaknya satu anggota tim perlu menguasai teknik penulisan karya ilmiah dengan baik agar bisa merangkum hasil analisis dari peneliti berbeda.

Mengembangkan Desain dan Instrumen Penelitian

Berasal dari beraneka bidang dan disiplin ilmu, proses ini perlu melewati beberapa kali curah pendapat dan diskusi untuk merumuskan berbagai aspek dan konsep, serta kerangka metodologis yang akan digunakan dalam kajian. Rangkaian kerja ini dimulai dengan curah pendapat tentang aspek yang perlu diteliti, dalam hal ini aspek-aspek penting dari rantai nilai sutra. Pada tahap ini setiap anggota TPK mengusulkan kerangka analitis yang relevan bagi kajian, khususnya dari pendekatan yang setiap anggota kuasai. Misalnya, peneliti berbasis gender mengusulkan kerangka analisis gender, peneliti ekonomi mengusulkan kerangka analitis ekonomi dari unit-unit usaha di sepanjang rantai sutra.

Setelah itu, TPK mendiskusikan kerangka umum kajian dengan menimbang usulan masing-masing anggota tim, mengambil konsep dan kerangka pikir yang relevan dari setiap usulan. Kerja ini berjalan seperti menyusun *puzzle*, di mana setiap anggota tim membawa perspektif, konsep, kerangka teoritik masing-masing untuk menyusun satu kerangka kajian yang utuh—bukan membentuk desain-desain penelitian berbeda sebanyak jumlah anggota tim.

Menurut pengalaman TPK, proses ini perlu dihadapi dengan keterbukaan bagi cara berpikir yang berbeda. Proses ini perlu dilakukan dengan tidak menghindari perbedaan pendapat, malah setiap perbedaan perlu dibicarakan agar terjadi

kesepahaman akan relevansi dan konsistensi alat analisis dari setiap anggota tim. Diskusi ini juga akan membuat anggota TPK memahami kerangka berpikir anggota tim, yang akan memudahkan komunikasi dalam tahapan-tahapan selanjutnya.

Setelah kerangka umum kajian disepakati, langkah selanjutnya tinggal merumuskan desain kajian secara tertulis dan membangun instrumen penelitian dari desain tersebut. Singkatnya, keluaran dari tahapan ini adalah desain kajian yang logis dan relatif lengkap secara perspektif, dan instrumen penelitian. Di titik ini ada satu pelajaran penting: keanekaragaman dan keluasan pengetahuan anggota TPK bisa menghemat waktu. Kajian ini tidak perlu melewati berbulan-bulan meninjau ulang kepustakaan untuk mengembangkan desain yang melihat tema kajian dari beraneka perspektif.

Instrumen penelitian yang tersusun secara sistematis, jelas dan kontekstual akan memudahkan penelitian lapangan. Daftar pertanyaan, baik dalam bentuk angket survei maupun panduan wawancara mendalam, perlu dirumuskan dalam bahasa yang jelas untuk menghindari kemajemukan tafsiran sehingga menyulitkan anggota Tim mengajukan pertanyaan ketika di lapangan.

Pertanyaan-pertanyaan itu juga perlu dibuat lebih akurat sesuai konteks lapangan. Di sini kajian literatur dan kehadiran anggota ahli yang menguasai aspek-aspek renik dalam tema kajian sangat membantu. Bayangkan bila Anda datang ke seorang petani yang memelihara ulat sutra dan menemukan bahwa ada sangat banyak aspek mendasar yang luput Anda tanyakan karena Anda datang dengan pertanyaan yang masih relatif umum. Spesifikasi pertanyaan juga membantu dalam proses wawancara. Misalnya, bila seorang peneliti mulai bertanya tentang kegiatan para penenun, dan ia akan sulit memahami jawaban informan karena memakai istilah-istilah lokal yang spesifik. Ini akan menyulitkan peneliti untuk melakukan *probing* dan menghasilkan kualitas wawancara yang berputar di permukaan isu yang dikaji.

Untuk mengantisipasi persoalan ini, perlu diadakan uji coba terhadap instrumen tersebut. TPK cukup berhasil menghindari persoalan ini dengan mengadakan uji coba instrumen survei maupun wawancara mendalam sebelum melakukan kerja yang sebenarnya. Uji coba ini dilakukan terhadap sekelompok responden dan informan yang tidak akan diwawancarai dalam penelitian.

Catatan penting lain yang perlu diajukan di sini ialah pentingnya sejarah pembentukan jejaring (networking) dalam menjaga komitmen para peneliti. Satu contoh, negosiasi kesediaan waktu anggota Tim Pelaksana Kajian untuk menetapkan jadwal lokakarya penyusunan desain kajian, yang butuh beberapa kali pertemuan, bisa berlangsung berlarut-larut bila berjumpa dengan respons lamban karena kurangnya komitmen terhadap kajian. Proses semacam ini bisa saja menghasilkan desain yang disusun secara terburu-buru pada akhir tenggat oleh sedikit anggota tim. Pada kasus yang lebih parah, proses ini bisa saja berujung kegagalan sebelum memulai kerja penelitian lapangan.

Dalam kasus kajian rantai nilai sutra yang merupakan kajian kolaboratif organisasi berbeda, kehadiran organisasi non-pemerintah yang kuat dalam hal jejaring seperti Yayasan BaKTI akan sangat membantu. Yayasan BaKTI yang berbasis di Makassar telah berpengalaman selama dua dekade melakukan berbagai aktivitas pengelolaan pengetahuan, termasuk kajian untuk kebijakan dan berjejaring dengan para peneliti baik dari dunia akademik maupun para pegiat organisasi masyarakat sipil, juga organisasi pemerintahan di berbagai level, serta mengenal dengan baik seluruh organisasi dan individu yang diajak terlibat dalam kajian ini. Jejaring ini tidak hanya membantu menemukan individu dan organisasi yang paling berkompeten dan relevan untuk mengerjakan kajian, hubungan yang telah terjalin antara pihak-pihak tersebut dengan Yayasan BaKTI memudahkan komunikasi dan koordinasi, baik di sepanjang proses kajian maupun menggerakkan tindak lanjut yang tercipta dari kajian tersebut. (bersambung)

INFORMASI LEBIH LANJUT
Penulis adalah Anggota Tim Pelaksana Kajian Rantai Nilai Sutra, Sulawesi Selatan. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program Knowledge to Policy, Anda dapat menghubungi **info@bakti.or.id**

INDONESIA BISA PANEN LISTRIK BESAR-BESARAN DARI 10 MILIAR PANEL SURYA, BERIKUT TEMPAT IDEAL UNTUK MEMASANGNYA

Oleh
DAVID FIRNANDO SILALAHI & ANDREW BLAKERS

Pada tahun 2050, Indonesia berpotensi menjadi negara maju yang bebas energi fosil. Seluruh kebutuhan energi untuk transportasi, industri, hingga peralatan memasak dapat dipasok dari energi surya.

Pada masa itu, konsumsi listrik dapat mencapai 9000 terrawatt jam (TWh) – meningkat 30 kali lipat dibanding saat ini yang sebesar 300 TWh. Permintaan setrum ini bisa dipenuhi oleh sekitar 10 miliar panel pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 7 terrawatt (TW), yang tersebar di seluruh penjuru negeri.

Prediksi ini bukan sekadar impian belaka. Badan Energi Internasional (IEA) menyatakan bahwa saat ini PLTS telah menjadi pembangkit listrik termurah. PLTS tercatat menyumbang separuh dari total tambahan kapasitas pembangkit listrik di seluruh dunia.

Riset terbaru tim 100% *Renewable Energy* dari Australian National University (ANU) pun mengungkapkan bahwa Indonesia mempunyai potensi energi surya berlimpah.

Potensinya jauh lebih besar dibanding gabungan seluruh potensi energi terbarukan lainnya seperti air, angin, hingga panas bumi.

Potensi energi surya Indonesia hasil riset ANU

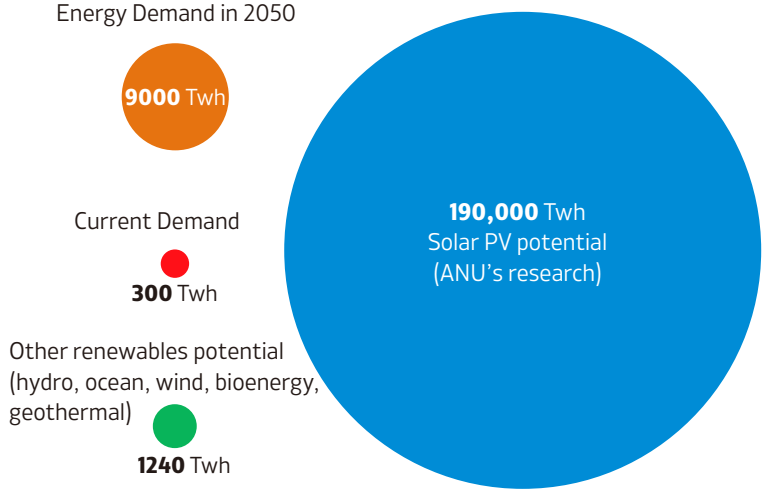

Indonesia's Vast Solar Energy Potential

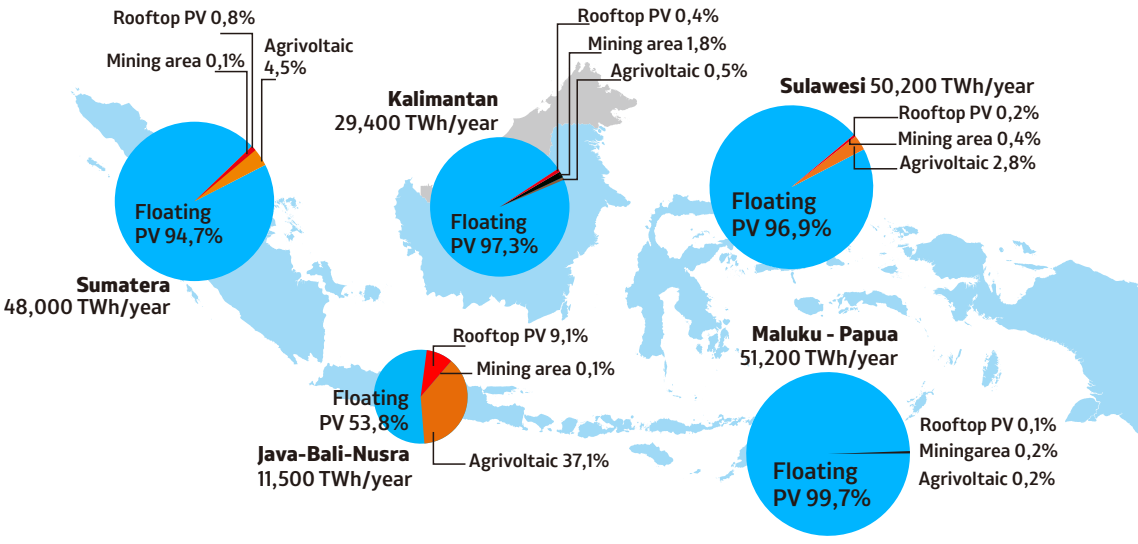

Bahkan, potensi energi surya yang ada akan melampaui perkiraan konsumsi energi di tahun 2050.

Miliaran panel surya itu ditaksir bakal memakan lahan hingga 35 ribu kilometer persegi(km^2), hampir seluas wilayah Jawa Barat. Lantas, di mana kita akan memasangnya?

Studi kami menganalisis miliaran panel surya ini dapat dipasang pada atap-atap rumah dan bangunan, lahan bekas tambang batu bara, lahan pertanian, dan terapung di permukaan waduk, danau, maupun laut.

Lokasi potensial memasang PLTS

Indonesia memiliki luas daratan dan perairan masing-masing mencapai 1,9 juta dan 6,4 juta meter persegi.

Itu berarti, panel surya pada 2050 nanti hanya membutuhkan 0,4% dari total luas wilayah kita. Inilah tempat-tempat potensial untuk memasang 10 miliar panel surya tersebut.

Pertama, atap gedung dan rumah: PLTS ini dapat dipasang pada atap rumah, gedung komersial dan pabrik-pabrik, sehingga tidak memerlukan lahan tambahan. Kami menghitung bahwa PLTS atap bisa menyumbang 7-19 persen dari total kapasitas energi Indonesia pada tahun 2050.

Kedua, agrivoltaik (APV) Konsep ini mengkombinasikan pemasangan PLTS dengan lahan pertanian yang ditumbuhi tanaman rendah *(low-growing crop)* seperti padi, jagung, teh, kopi, hingga tomat. Di tanah air, kawasan ini mencapai 210 ribu kilometer persegi.

Nah, dengan hanya memanfaatkan 10-30 persen dari total luas lahan pertanian tersebut, Indonesia sudah bisa memasang 3-9 miliar panel surya.

Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara lain seperti Jerman, Cina, India, dan Belanda yang mengembangkan PLTS model ini dengan skala besar dan tersambung ke jaringan listrik utama di negara masing-masing.

Ketiga, lahan bekas tambang Penempatan PLTS di lahan bekas tambang batu bara memiliki keunggulan tersendiri. Umumnya kawasan ini sudah memiliki jaringan listrik, sehingga tak perlu membangun jaringan listrik baru. Ongkos pengembangan proyek PLTS tersebut dapat menjadi jauh lebih hemat.

Kami menemukan ada sekitar 2.300 kilometer persegi lahan bekas tambang di Indonesia. Lahan seluas itu dapat menampung sekitar 0,5 TW panel surya (setara dengan 7% dari kebutuhan).

Keempat, PLTS terapung Pengembangan PLTS terapung saat ini meningkat sangat cepat. Ada dua opsi yang bisa dimanfaatkan:

Waduk atau danau: Indonesia memiliki banyak danau yang bisa menjadi kawasan besar untuk pemasangan PLTS. Misalnya Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Maninjau di Sumatera Barat, dan Danau Sentani di Papua. Dengan adanya batasan maksimum dari pemerintah yakni 5% pemanfaatan permukaan, maka PLTS terapung di kawasan ini hanya dapat dikembangkan seluas 2.500 kilometer persegi.

Laut: Kawasan perairan dengan tinggi ombak maksimum empat meter dan kecepatan angin maksimum 15 meter per detik merupakan lokasi yang aman untuk pemasangan PLTS. Di Indonesia, ada seluas 700 ribu kilometer persegi perairan jenis ini yang dapat dimanfaatkan.

Studi kami menganalisis luas tersebut mampu memenuhi permintaan listrik hingga 180 ribu TWh – 20 kali lebih besar dari kebutuhan energi Indonesia pada tahun 2050. Bahkan, potensi ini mampu memasok konsumsi setrum 10 miliar penduduk dunia di masa mendatang.

Di kala hujan ataupun malam hari, saat matahari tidak bersinar, PLTS tak berfungsi optimal. Guna mengatasi hal ini, Indonesia dapat mengandalkan potensi energi besar dari pembangkit listrik tenaga air *pumped storage*.

Pembangkit ini membutuhkan dua waduk yang terletak di ketinggian berbeda. Keduanya terhubung dengan terowongan yang dilengkapi pompa besar – dioperasikan dengan pasokan listrik dari PLTS – dan turbin listrik.

Saat hari-hari cerah, kelebihan energi dapat disimpan dengan memompa air ke waduk yang

Foto: Adiwit B. Pramono/Yayasan BaKTI

lebih tinggi sebagai cadangan. Lalu, air tersebut dapat dialirkan melalui terowongan menuju waduk di bawahnya sehingga menggerakkan turbin dan menghasilkan setrum saat produksi listrik PLTS sedang surut.

Metode *pumped storage* menjadi opsi terbaik karena kebutuhan lahannya tak sebesar PLTA konvensional, biasanya hanya sekitar 200 hektare. Karena itu, risiko-risiko sosial maupun lingkungan bisa jauh berkurang.

Impian ini masih panjang, tapi bisa dijangkau

Saat ini, kapasitas PLTS listrik di Indonesia masih kecil, hanya 154 megawatt (MW). Torehan ini masih kalah dengan Australia (25.000 MW), Vietnam (16.500 MW), dan bahkan Singapura (377 MW).

Kapasitas PLTS kita masih bisa digenjot. Indonesia akan mengoperasikan PLTS terapung pertama berkapasitas 145 MW di Waduk Cirata pada tahun depan. Pemerintah juga akan mengembangkan proyek serupa di delapan waduk lain di Jawa dan Sumatera.

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan pembangkit listrik di lahan bekas tambang dengan total kapasitas 2.300 MW: di Bangka Belitung (1.250 MW); serta di Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur masing-masing 1.000 MW dan 53 MW.

Sementara, pemakaian PLTS atap bangunan juga bersiap untuk lepas landas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral merilis regulasi Nomor 26 Tahun 2021 yang mewajibkan PLN membayar 100 persen listrik dari PLTS atap. Aturan ini dapat menjadi pemanis agar lebih banyak pemilik bangunan dan rumah memasang panel surya.

Energi surya dapat menjadi peluang besar bagi pemenuhan energi masa depan. Guna menggenjot kapasitas PLTS, lokasi potensial di atas harus dimanfaatkan.

Seiring dengan hal itu, pemerintah sebaiknya menerbitkan regulasi yang mengizinkan PLTS terapung di laut; menambah lebih banyak PLTS terapung di danau ataupun waduk; pemberian insentif untuk mendorong pengembangan proyek tenaga surya di lahan bekas tambang; dan mendorong penelitian tentang kombinasi pemasangan PLTS di kawasan pertanian Indonesia. Langkah lainnya adalah mengidentifikasi potensi-potensi lokasi terbaik untuk PLTA *pumped storage*.

INFORMASI LEBIH LANJUT

David Firnando Silalahi adalah Phd Candidate, School of Engineering, Australian National University dan **Andrew Blakers** adalah Professor of Engineering, Australian National University

Artikel ini bersumber dari **https://theconversation.com/indonesia-bisa-panen-listrik-besar-besaran-dari-10-miliar-panel-surya-berikut-tempat-ideal-untuk-memasangnya-168812**

Membudayakan Pola Asuh Anak Tanpa Kekerasan

Oleh
M. GHUFRAN H. KORDI K.

Kekerasan terhadap anak di sekolah dan di masyarakat masih dianggap sebagai hal yang lumrah oleh sebagian kalangan. Kekerasan dianggap sebagai cara mendisiplinkan dan mendidik anak, agar anak menjadi disiplin, patuh, dan baik. Karena itu, masih ada guru yang melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak didiknya. Di rumah, orang tua yang tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam pengasuhan *(parenting)*, menjadikan kekerasan sebagai cara mengatasi anak-anak yang aktif dan hiperaktif.

Pola asuh atau pengasuhan adalah pengetahuan dan keterampilan yang dapat dipelajari, diajarkan, dan dikembangkan oleh siapapun, baik pembelajaran turun-temurun, maupun melalui pendidikan formal dan nonformal. Namun di kalangan masyarakat, pola asuh anak dianggap sesuatu yang hanya dapat diperoleh

Foto: Dok. Yayasan BaKTI

melalui pembelajaran secara turun-temurun. Karena itu, sering terdengar kalimat seperti ini: "tidak ada sekolah menjadi orang tua", "menjadi orang tua tidak butuh sekolah", dan seterusnya.

Budaya Pengasuhan Konvensional

Di negeri ini, tidak ada sekolah khusus untuk calon orang tua atau orang tua. Tapi siapa saja dapat belajar untuk menjadi calon orang tua atau orang tua. Salah satu yang perlu dipelajari adalah pola asuh atau pengasuhan anak yang berlangsung turun-temurun. Terdapat budaya pengasuhan anak konvensional yang sangat baik, namun mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Sementara beberapa praktik pengasuhan anak tidak baik, misalnya yang menonjolkan penghukuman fisik dan kekerasan anak masih dianut.

Pengasuhan anak yang dilakukan oleh keluarga dan komunitas merupakan budaya pengasuhan yang sangat baik. Jika anak kehilangan pengasuh utama, maka keluarga akan mengambil alih pengasuhan anak bersangkutan. Demikian juga komunitas bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan anak bersangkutan. Anak tidak dijauhkan, apalagi dipisahkan dari keluarga atau orang-orang yang mempunyai hubungan darahnya dengannya.

Model keluarga dan komunitas akan menjauhkan anak dari panti asuhan atau LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak), atau apapun namanya. Panti asuhan bukan hanya alternatif terakhir saja, tetapi panti asuhan seharusnya menjadi lembaga kesejahteraan dan perlindungan anak yang mengadopsi pengasuhan ala keluarga dan komunitas, sehingga panti asuhan hanya menerima anak-anak di komunitas atau anak-anak di sekitar yang membutuhkan pengasuhan alternatif.

Moral pengasuhan anak konvensional menempatkan anak sebagai obyek, hak milik orang tua/pengasuh, manusia kecil, dan tidak mempunyai hak. Karena itu, kekerasan dan eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua dan orang-orang terdekat menjadi sesuatu yang dianggap lumrah, dan urusan rumah tangga/keluarga.

Kekerasan dan eksploitasi anak, berkembang dan menemukan berbagai legitimasi, baik di dalam keluarga (cara mendidik dan membesarkan anak), pendidikan, budaya, ekonomi, dan hingga politik. Kekerasan dan eksploitasi anak diterima, dibudayakan, dan ditransformasi secara terus-menerus dengan berbagai media dan metode. Kekerasan terhadap anak adalah produksi dan budaya manusia, bukan sesuatu yang turun dari langit.

Moral Pengasuhan Anak Kontemporer

Pengasuhan anak kontemporer mengadopsi praktik pengasuhan anak yang baik di berbagai belahan dunia. Konvensi Hak Anak (KHA) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1989 adalah, pencapaian masyarakat dunia dalam mempertemukan hal-hal baik dan membuat kesepakatan untuk menempatkan anak sebagai subjek, pemilik hak dan

Foto: **Dok. Yayasan BaKTI**

perlindungan, serta negara berkewajiban dan bertanggung jawab *(state obligation)* untuk memenuhi hak-hak anak tersebut.

KHA adalah konvensi induk HAM untuk anak yang mengandung: (1) hak-hak sipil dan politik; dan (2) hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan cakupan hak yang terkandung di dalam KHA adalah: (1) hak atas kelangsungan hidup *(survival)*; (2) hak untuk berkembang *(development)*; (3) hak atas perlindungan *(protection)*; dan (4) hak untuk berpartisipasi *(participation)* dalam kehidupan masyarakat. Ditinjau dari sisi yang berkewajiban melaksanakan KHA yaitu negara *(state obligation)* dan yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak adalah orang tua dan orang dewasa pada umumnya. Ada tiga kata kunci yang dipakai di dalam KHA, yaitu: (1) penuhi *(fulfill)*; (2) lindungi *(protect)*; dan (3) hormati/hargai *(respect)*. Satu lagi kata kunci yang perlu ditambahkan adalah majukan *(promote)*.

KHA dan protokol-protokolnya, serta aturan terkait yang dikeluarkan berbagai lembaga kerja sama internasional mengadopsi moral pengasuhan anak kontemporer. Di dalam KHA, anak adalah pemegang hak, subyek, dan korban. Jika anak terlibat dalam pidana, maka anak adalah pelaku sekaligus korban dari pengasuhan, lingkungan, dan negara. Karena itu, anak harus mendapat perlindungan dan perlakuan khusus agar dapat kembali menjalani kehidupan normal.

KHA menekankan pemenuhan hak dan perlindungan anak dari berbagai praktik kekerasan dan eksploitasi. Praktik kekerasan dan eksploitasi harus dicegah sejak dari orang tua atau pengasuh. Rumah harus menjadi tempat yang kondusif tumbuh kembangnya anak-anak. Di dalam Islam, bahkan berkata kasar atau menghardik pun dilarang. Di dalam Al-Quran Surat Surat 107 *(Al-Mâ'ûn)*: 2 ada *term "yadu'u"* yang diartikan sebagai "menghardik". Sementara di dalam Surat 37 *(AS-Sâffât)*: 102 dikisahkan bagaimana Nabi Ibrahim meminta pendapat anaknya, Ismail. Artinya pandangan anak atau hak partisipasi yang ada di dalam instrumen-instrumen saat ini pun telah diajarkan oleh para Nabi sejak dulu dan ditegaskan di dalam kitab suci.

Pengetahuan dan Keterampilan Pola Asuh

Namun, saat ini kekerasan terhadap anak semakin meningkat, karena selain kekerasan konvensional yang telah terjadi selama ini, kekerasan juga mendapatkan media dan ruang baru, internet atau media daring (dalam jaringan), yang dikenal sebagai kekerasan berbasis siber atau kekerasan berbasis digital.

Pada kekerasan konvensional, pelaku adalah orang-orang yang selalu bertemu dan berinteraksi dengan korban. Sedangkan

Foto: **Dok. Yayasan BaKTI**

Kegiatan Parenting di Buhung Bundang di Kabupaten Bulukumba (kiri) dan di Desa Majannang di Kabupaten Maros (kanan). Foto : **Dok. Yayasan BaKTI**

kekerasan terhadap anak berbasis siber, pelakunya adalah siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, baik yang dikenal maupun tidak dikenal korban. Internet dan media sosial semakin menempatkan anak menjadi rentan kekerasan, baik sebagai korban maupun pelaku.

Untuk itu, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak harus melibatkan dan dilakukan pada semua strata sosial, kelompok, komunitas, hingga teritori. Di dalam lingkungan keluarga, anak menjadi korban kekerasan dari orang-orang dekat, termasuk orang tua dan pengasuhnya. Padahal orang tua dan pengasuh adalah lingkungan pertama di mana anak tumbuh kembang dan belajar kehidupan.

Untuk itu, Yayasan BaKTI atas dukungan UNICEF *(United Nations Children's Fund)* melakukan Sesi *Parenting* di desa/kelurahan di Kabupaten Maros, Gowa, Bulukumba, dan Kota Makassar. Sesi *Parenting* dimaksudkan untuk mengenalkan pola pengasuhan yang baik kepada orang tua, calon orang tua, dan pengasuh. *Parenting* dilakukan oleh Fasilitator Masyarakat yang berada di desa/kelurahan setempat, yang merupakan kader dan tokoh masyarakat desa/kelurahan. Fasilitator Masyarakat sebelumnya telah mengikuti Pelatihan mengenai Pengasuhan, Pertolongan Pertama Psikologis, Memahami Kerentanan, serta Identifikasi Anak dan Keluarga Rentan. Fasilitator Masyarakat ini merupakan sumber daya untuk pengembangan Sistem Perlindungan Anak Berbasis Desa/ Kelurahan.

Kegiatan *Parenting* di desa/kelurahan adalah bagian dari Program Penguatan Lingkungan Aman dan Ramah Anak (*Strengthening Safe and Friendly Environment for Children*-SAFE4C), kerja sama Yayasan BaKTI, UNICEF, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), dan Dinas Sosial (Dinsos) di di Kabupaten Maros, Gowa, Bulukumba, dan Kota Makassar.

Pelatihan Parenting kepada orang tua dan pengasuh perlu dilakukan terus-menerus untuk menjangkau orang tua, pengasuh, dan calon orang tua yang lebih luas. Program SAFE 4C ini juga mendorong Sistem Perlindungan Anak Berbasis Desa/Kelurahan, yang di dalamnya termasuk menjadikan Pelatihan *Parenting* sebagai salah satu program desa/kelurahan untuk pencegahan kekerasan dan eksploitasi anak. Perlu membudayakan pola asuh tanpa kekerasan yang dimulai dari desa dan kelurahan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program Kerja Sama UNICEF - BaKTI dapat menghubungi **info@bakti.or.id**

MELIHAT KADER TANAMA BEKERJA

Oleh
SYAIFULLAH

Kantor Kampung Tanama masih sepi. Hanya ada beberapa perangkat kampung yang bersiaga di sebuah ruangan di satu sisi kantor kampung itu, tepat di sebelah aula berukuran sekitar 12 x 5 m. Di aula itu ada belasan bangku kayu seperti bangku sekolah, menghadap ke sebuah sisi yang ditata seperti panggung. Beragam kegiatan kampung biasanya dilakukan di situ. Sosialisasi, musyawarah, atau bahkan kegiatan vaksinasi COVID-19 juga digelar di sana.

Dua orang kader kampung dan satu orang kader posyandu bercengkerama di aula itu bersama seorang aparat kampung.

"Saya sudah jadi kader sejak 2017," kata Febrianti Raga atau yang kerap disapa Febri. Gadis muda berkerudung itu salah satu kader kampung paling senior di Distrik Pariwara, distrik tempat Kampung Tanama berada.

Kampung Tanama berada tidak jauh dari pusat Kota Fakfak, Papua Barat. Dia ada di jalur bandara, di pesisir teluk. Kantor kampung bahkan berada di ketinggian, menghadap ke laut. Kampung Tanama dihuni 328 kepala keluarga dengan total 1423 jiwa penduduk yang dibagi ke dalam 6 RT.

Keseluruhan penduduk itu telah tercatat dalam data kependudukan yang dilakukan oleh aparat kampung dibantu oleh Kader Pendamping Masyarakat Kampung (KPMK). Setiap kampung dalam Distrik Pariwara punya dua kader. Di Tanama ada Febri dan satu lagi perempuan berdarah NTT, Sakni Santa Ana Falden. Sakni baru menjadi kader kampung di awal tahun 2021 menggantikan kader kampung sebelumnya yang mengundurkan diri.

Foto: Syaifullah/Yayasan BaKTI

"Waktu itu saya ikut pelatihan kader di Sorong," kata Sakni. Pelatihan kader yang dimaksudnya adalah pelatihan kader kampung yang diadakan oleh tim Landasan KOMPAK-BaKTI di awal tahun 2021. Pelatihan yang diadakan itu dimaksudkan untuk melatih para kader kampung melakukan pendataan dan penginputan data ke dalam aplikasi SAIK+.

Aplikasi SAIK+ ini adalah aplikasi yang yang digunakan dalam program PROSPPEK. Dengan aplikasi SAIK+, data kampung menjadi sangat spesifik. Prosesnya dimulai dengan pendataan manual setiap warga dari rumah ke rumah yang dilakukan oleh para kader. Data manual itu kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi SAIK+ oleh para kader, dan data itulah yang kelak akan digunakan dalam proses perencanaan kampung. "Data itu sangat membantu kita, aparat kampung," kata Muhammad Ali Rumoning, Sekretaris Kampung Tanama. "Kemarin waktu kita mau menyalurkan bantuan COVID-19, kita pakai itu data SAIK+. Kita bisa tahu betul berapa jumlah warga di kampung ini dan bagaimana kondisi mereka," sambungnya lagi.

Data SAIK+ yang dikumpulkan dari pintu ke pintu itu memang berisi data yang spesifik dan riil. Datanya bukan cuma berupa nama, alamat, atau nomor induk kependudukan, tapi sampai ke data spesifik seperti kondisi rumah, air bersih, sanitasi, dan sebagainya. Benar-benar data yang spesifik dan bisa digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Pendataan Sudah Selesai

"Awalnya kita agak susah juga waktu mau mendata," kata Febri Raga. Dia mengenang awal-

Foto: Syaifullah/Yayasan BaKTI

awal melakukan pendataan di kampung Tanama. Pertanyaan atau bahkan penolakan warga adalah hal yang umum ditemui Febri dan teman-teman kader kampung ketika awal melakukan pendataan.

Pertanyaan paling umum adalah, "Untuk apa ini pendataan?" Warga tentu bertanya-tanya, karena selama ini pun pendataan sudah berkali-kali dilakukan tapi mereka seperti tidak merasakan manfaatnya.

Tantangan lain muncul di tahun 2020 ketika masa pemilihan bupati Kabupaten Fakfak digelar. Ada warga yang menolak didata karena curiga kalau pendataan itu punya unsur politis. "Kita dikira ada hubungannya sama pemilihan bupati," kata Muhammad Ali Rumoning. Ini tentu menjadi tantangan untuk para aparat kampung dan kader kampung untuk menjelaskan kalau pendataan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan politik.

Beruntung karena semua penolakan itu tidak berlangsung lama. Warga cepat paham pentingnya data kampung itu. Belakangan pun mereka bisa melihat sendiri bagaimana aparat kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (Baperkam) menyusun rencana pembangunan kampung dengan memanfaatkan data yang sudah dikumpulkan dan dimasukkan ke aplikasi SAIK+.

"Sekarang pendataan di kampung Tanama sudah selesai 100%," kata Febri.

Inisiatif Belajar Para Kader

Selesai mendata, para kader ini ternyata tidak berhenti sampai di situ. Mereka ingin belajar lebih jauh, tidak sekadar mendata dan menginput data, tapi bagaimana melakukan analisis data. Meski ini bukan kewajiban mereka, tapi rasa ingin tahu membuat kader kampung ini ingin belajar.

Awalnya memang adalah inisiatif dari Koordinator Kabupaten (Korkab) dan Koordinator Distrik (Kordis) Program KOMPAK - LANDASAN Kabupaten Fakfak. Wilson Tulle, Korkab Fakfak dan Ibu Listiati Kordis Pariwari mendorong para kader distrik Pariwari untuk berjejaring. Mereka berkumpul di grup WhatsApp yang fungsi utamanya adalah berbagi informasi antar kader kampung di Distrik Pariwara. Dari grup itulah kemudian muncul usulan untuk belajar lebih lanjut tentang analisis data.

"Mereka semangat sekali mau belajar, jadi kita coba fasilitasi. Kita minta pak Ryan untuk ikut bantu," kata Ibu Listianti, kordis Pariwari. Ryan yang dimaksud adalah Ryan Hatuala, salah satu staf monitoring dan evaluasi program LANDASAN. Ryan memang kerap membantu urusan analisis data di program LANDASAN.

Usulan itu bersambut. Ryan dengan senang hati membantu meningkatkan kapasitas kader Distrik Pariwari yang punya rasa ingin tahu yang besar itu. Karena perbedaan jarak Fakfak dan Jayapura tempat Ryan berdiam, maka pelatihan digelar secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Pelatihan itu digelar secara berkala dalam beberapa pertemuan.

"Saya lupa totalnya berapa, tapi yang saya ingat bulan Agustus kemarin pelatihan sempat dilakukan selama seminggu penuh," kata Ryan. Dalam pelatihan itu, para kader dilatih untuk melakukan analisis data sederhana dengan menggunakan Microsoft Excel. Salah satunya adalah menggunakan fungsi *Pivot Table*.

"Waktu itu saya minta Ibu Lis untuk mengelompokkan mereka sesuai kemampuannya dulu. Takutnya kalau disamakan semua, nanti tidak efektif. Mereka yang sudah mengerti bisa merasa bosan sama materinya, sementara yang belum tahu bisa kesulitan mengikuti materi. Jadi saya pisahkan menurut kemampuan mereka," kata Ryan lagi.

Pelatihan analisis data itu sebenarnya bukan tanggung jawab para kader. Tanggung jawab utama mereka hanya berhenti di penginputan data ke dalam aplikasi SAIK+, tapi rasa ingin tahu dan keinginan belajar itu membuat mereka bersemangat. Mereka tidak merasa cukup berhenti sampai di pendataan saja, tapi ingin tahu juga bagaimana proses analisis data agar data-data itu benar-benar bisa dimanfaatkan.

Menurut Ryan, mereka sangat bersemangat. Meski pelatihan ini di luar tugas wajib mereka, tapi rasa ingin tahu mereka yang besar membuat mereka rela untuk menyisihkan waktu dan tenaga. Apalagi ketika melakukan pelatihan, mereka harus menggunakan dua gawai. Satu gawai mengakses Zoom dan satu lagi membuka Microsoft Excel.

"Saya memang melakukannya pelan-pelan, karena ini hal baru. Tidak gampang melakukan pelatihan secara *online*," kata Ryan.

Apresiasi Bupati Fakfak

Jumat 1 Oktober 2021, dalam rangkaian *Training of Trainer* (ToT) Sekretariat Bersama PROSPPEK Kabupaten Fakfak, Bupati Kabupaten Fakfak Untung Tamsil berkenan hadir dalam kegiatan yang digelar di Hotel Grand Papua, Fakfak itu.

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh kader kampung Tanama untuk mendemonstrasikan pendataan SAIK+ yang telah mereka lakukan. Kader kampung ini diwakili oleh Febri Raga dan Sakni Falden. Mereka berdua mendemonstrasikan bagaimana data yang telah mereka kumpulkan dan masukkan ke SAIK+ ini bisa dengan mudah diakses dan dipilih sesuai kriteria. Misalnya, mereka bisa dengan mudah melihat data penduduk Kampung Tanama yang Orang Asli Papua, tidak bersekolah, tinggal di rumah yang tidak bersegel dan tidak punya air bersih. Data ini tentu bisa membantu aparat kampung bila ingin merencanakan bantuan perumahan dan air bersih.

Demonstrasi ini sangat menarik perhatian Bupati Fakfak. Menurutnya, data ini sangat membantu pemerintah untuk melakukan perencanaan yang tepat sasaran.

"Saya sangat mendukung penggunaan aplikasi SAIK+ ini," kata Bupati Fakfak, Untung Tamsil. Namun, dia juga menambahkan, "Kalau bisa ditambah dengan data yang berhubungan dengan sektor pertanian dan perikanan. Karena, sebagian besar kita orang di Fakfak ini hidup dari sektor pertanian dan perikanan."

Febri, Sakni, dan puluhan kader kampung lain di Distrik Pariwari, Fakfak ini telah menunjukkan bagaimana pentingnya data. Mereka telah melewati berbagai fase yang penuh dinamika. Dari penolakan saat pendataan hingga proses penginputan data. Mereka bahkan tidak mau berhenti sampai di situ, karena mereka terus mencoba belajar lebih jauh bagaimana menganalisis data yang telah mereka kumpulkan.

Begitulah cara kader Kampung Tanama dan Distrik Pariwari itu bekerja. Hasil kerja mereka pun bisa dirasakan oleh para aparat kampung dan aparat pemerintahan lainnya. Semua tentu demi kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KOMPAK-LANDASAN Fase II, dapat menghubungi **info@bakti.or.id**

PERENCANAAN PARTISIPATIF PENGELOLAAN IRIGASI SALOBUNNE KABUPATEN SOPPENG

Oleh **ARYANTI SAYADI, SP**

Irigasi merupakan komponen penting dalam menunjang pembangunan pertanian di Indonesia. Ketersediaan air irigasi yang cukup merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat produktivitas hasil pertanian. Di Indonesia, kebutuhan penggunaan air untuk irigasi paling besar dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi air lainnya.

Aspek	Identifikasi Permasalahan
Kondisi Umum	1. Ketersediaan air yang ada pada bendung masih kurang tidak memenuhi untuk seluruh areal persawahan yang potensial. 2. Kebocoran atau kehilangan air pada saluran masih terjadi, juga terdapatnya kerusakan berat pada lantai saluran primer.
Sosial Ekonomi	1. Tingkat pendapatan petani belum optimal 2. Akses Permodalan masih sulit
Teknik	1. Pendangkalan saluran primer BB1-BB5 2. Pendangkalan saluran sekunder BB5-BB6 dan BK1-BK2 3. Kerusakan berat sedang dan ringan pada lining kiri kanan pada saluran induk dan sekunder. 4. Lantai saluran masih kondisi tanah untuk saluran sekunder Lompo (BB5-BL1) 5. Pembangunan saluran sekunder (BB8-BB9) dan (BK2-BT2) 6. Sebagian besar saluran tersier masih kondisi tanah.
Kelembagaan	1. Pengurus GP3A dan P3A banyak yang tidak aktif 2. Kemampuan pengurus GP3A dan P3A dalam pengelolaan administrasi masih kurang. 3. Keterlibatan wanita dalam organisasi P3A masih kurang.
Usaha tani	1. Kurangnya pengetahuan petani tentang pengolahan hasil panen (Pasca Panen) 2. Pengolahan lahan dan penunjang pasca panen masih sederhana 3. Minimnya ketersediaan mekanisasi pertanian 4. Produksi dan Produktivitas hasil pertanian belum optimal
Potensi sumber Daya lokal	1. Kurangnya debit air yang ada di daerah irigasi menyebabkan terjadinya kekeringan lahan. 2. Penangkaran bibit yang tersedia di masyarakat masih kurang pada umumnya masih disuplai oleh Pemerintah.

Kebutuhan air irigasi diperkirakan sekitar 80% dari total konsumsi air. Kebijakan Pengelolaan Irigasi telah dibagi berdasarkan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015, luas potensial daerah irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan adalah 105.666 Ha yang terbagi atas 38 Irigasi permukaan, 2 irigasi rawa dan 27 irigasi tambak. BPS tahun 2018 menunjukkan bahwa luas lahan sawah di provinsi Sulawesi Selatan sebesar 649.190 Ha dan 60,19 % diantaranya merupakan lahan sawah beririgasi.

Pengelolaan irigasi menjadi hal yang penting dalam mendukung produktivitas pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan. Irigasi memerlukan investasi yang besar untuk membangun sarana dan prasarananya, operasional dan pemeliharaannya, sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang baik dan tepat agar penggunaan air irigasi memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pengguna air irigasi. Salah satu lembaga yang sangat berperan di tingkat masyarakat khususnya dalam pengelolaan irigasi adalah P3A/GP3A/IP3A yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan irigasi di petak tersier dan berpartisipasi pada jaringan sekunder dan primer. Namun kemampuan

P3A/GP3A/IP3A dianggap masih rendah dalam mendukung pengelolaan irigasi yang berkelanjutan.

Kabupaten Soppeng adalah salah satu daerah penghasil beras terbesar setelah Sidrap dan Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan. Luas lahan pertanian di Kabupaten Soppeng adalah 97.971,99 Ha dan 29,72% merupakan lahan persawahan atau sebesar 29.124,86 Ha. Lahan pertanian sawah berupa lahan sawah irigasi mencapai 24.391,72 hektar dan sawah tadah hujan seluas 4.733,14 hektar. Salah satu Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang terdapat di Kabupaten Soppeng adalah adalah daerah Irigasi Salobunne. Daerah irigasi ini telah memiliki kelembagaan di tingkat petani pengguna air, namun keaktifannya dalam pengelolaan irigasi secara partisipatif belum optimal. Olehnya itu perlu menyusun strategi perencanaan yang partisipatif dalam mendorong keterlibatan P3A/GP3A/IP3A dalam pengelolaan irigasi pada petak tersier sesuai kewenangan yang dimilikinya. Proses ini dimulai dengan pelaksanaan FGD yang dilakukan di Desa Tellulimpoe Kelurahan Attang Salo Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng yang pesertanya berasal dari perkumpulan petani pemakai air (P3A), Unsur Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, tenaga pendamping masyarakat, serta *stakeholders* lainnya.

Pelaksanaan FGD diawali dengan mengidentifikasi permasalahan yang muncul melalui informasi yang disampaikan oleh peserta FGD. Permasalahan yang teridentifikasi dikelompokkan menjadi 6 aspek , yaitu (1) aspek kondisi umum Daerah Irigasi, (2) Aspek Sosial Ekonomi, (3) Aspek Teknis Irigasi, (4) Aspek Kelembagaan, (5) Aspek Usaha tani, dan (6) Aspek Potensi Sumber Daya Lokal. Adapun rincian permasalahan Pengelolaan Daerah Irigasi (DI) Salobunne di Kabupaten Soppeng yang teridentifikasi dalam FGD.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pengelolaan irigasi, selanjutnya dilakukan perangkingan untuk menentukan prioritas permasalahan berdasarkan kriteria mendesak, masalah utama, kepentingan umum, ketersediaan potensi, menambah penghasilan. Berdasarkan rumusan identifikasi masalah dan perangkingan permasalahan yang telah disepakati dalam FGD, selanjutnya dilakukan perumusan alternatif kebijakan untuk menjawab permasalahan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara tim Teknis (UPT Irigasi) dan *Stakeholder* yang difasilitasi oleh Tim Pendamping Masyarakat. Terdapat 5 permasalah utama yang sifatnya mendesak dan berpengaruh penting terhadap aktivitas pertanian bagi masyarakat pengguna air irigasi pada DI Salobunne, yakni Kehilangan air pada Bendung & saluran irigasi tinggi; Lantai saluran Sekunder Lompo masih konstruksi tanah (BB5-BL1); Saluran sekunder (BB8 – BB9) dan (BK2 – BT2) masih konstruksi tanah; Sebagian besar saluran tersier masih berupa saluran tanah kondisi tanah; dan Kurangnya pengetahuan petani tentang pengolahan hasil panen. Alternatif kebijakan dalam menanggulangi permasalahan utama tersebut adalah Rehabilitasi Bendung dan saluran irigasi; Rehabilitasi Lantai saluran Sekunder Lompo masih konstruksi tanah (BB5-BL1); Rehabilitasi Saluran sekunder (BB8-BB9) dan (BK2-BT2); Pembuatan saluran tersier permanen; dan Pendampingan dan pelatihan petani dalam pengolahan hasil panen.

Alternatif kebijakan yang dihasilkan dari proses FGD dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan irigasi pada Daerah Irigasi Salobunne diharapkan dapat menjadi bagian dalam proses perencanaan pembangunan tahapan perencanaan mulai dari musrenbang tingkat desa hingga Musrenbang provinsi, mengingat bahwa daerah Irigasi Salobunne merupakan daerah irigasi kewenangan provinsi. Pada akhirnya, alternatif kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Soppeng.

INFORMASI LEBIH LANJUT
Penulis dapat di hubungi melalui email: **aryantisayadi03@gmail.com**

Novi Kurnia sebagai fasilitator dalam pelatihan literasi digital atasi hoaks Covid-19 secara luring di Sleman yang diadakan oleh UPN Veteran Yogyakarta pada Juni lalu.
Sumber: **theconversation.com**

HARI LITERASI 2021

Pemerintah dan Masyarakat Perlu Kembangkan Terus Pendekatan yang Beragam

Oleh
ENGELBERTUS WENDRATAMA, NOVI KURNIA & ZAINUDDIN MUDA Z. MONGGILO

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, supaya warga makin mampu menemukan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi melalui berbagai media digital. Kemampuan ini begitu penting ketika perangkat dan konten digital semakin mendominasi perilaku komunikasi warga.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, misalnya, telah menjadikan literasi digital sebagai salah satu konsep dalam Kurikulum 2013 sejak 2017 yang disusul dengan peluncuran modul literasi digital untuk sekolah dasar pada tahun ini.

Pemerintah juga telah menyelenggarakan beberapa program literasi digital bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, seperti kampanye lawan hoaks COVID-19 lalu Program Makin Cakap Digital, program hasil kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama ratusan organisasi maupun komunitas.

Beberapa gerakan literasi media juga muncul dari inisiatif masyarakat. Salah satu contohnya adalah Program Tular Nalar yang merupakan kolaborasi berbagai gerakan masyarakat sipil seperti Mafindo, Maarif Institute, Love Frankie, dan didukung oleh Google, untuk mengajak masyarakat dalam peningkatan kompetensi kritis mengelola informasi.

Meski demikian, semua upaya formal dan informal itu masih belum bisa memenuhi kebutuhan warga yang sangat beragam. Oleh

karena itu, kami melihat pentingnya pemangku kepentingan untuk mengupayakan beragam pendekatan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat yang sangat majemuk.

Pemerintah perlu mengembangkan semangat lokalitas dalam desain program literasi digital, supaya tidak bersifat Jawa-sentris dan mengulang kesalahan program-program nasional lainnya.

Pendekatan Multitarget

Hampir 70% pengguna internet di Indonesia berasal dari kalangan (usia produktif) antara 19-49 tahun.

Data menunjukkan tingkat literasi digital kelompok usia produktif tersebut lebih tinggi dibandingkan mereka yang berusia di atas 55 tahun, yang masih relatif rendah.

Artinya, program literasi harus lebih intensif dipersiapkan bagi warga usia lanjut tersebut.

Selain kelompok usia, program literasi digital Indonesia juga perlu menyasar kelompok-kelompok yang juga masih rentan terpapar oleh efek negatif penggunaan media digital, terlebih ketika penggunaan media digital kian meningkat pada masa pandemi Covid-19.

Mereka adalah kelompok anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas yang meski sering menjadi korban konten negatif di ruang maya, mereka merupakan kelompok penting untuk mewujudkan literasi digital Indonesia yang lebih inklusif.

Anak-anak adalah generasi tumpuan yang perlu dipersiapkan dan didampingi agar bisa mengoptimalkan kecakapan digital yang dimiliki sedari dini. Perempuan khususnya ibu adalah garda terdepan dalam keluarga untuk menggunakan media digital dengan lebih bijak dan cermat. Sedangkan, penyandang disabilitas perlu didukung eksistensinya oleh berbagai pihak agar dapat mengenyam program-program kecakapan yang lebih ramah bagi mereka.

Pendekatan multiprogram

Masyarakat Indonesia sangat beragam sehingga program literasi digital sebaiknya juga bervariasi.

Selama ini ada kecenderungan bahwa program literasi digital dilakukan secara digital pula melalui berbagai media digital.

Tetapi, perlu diingat bahwa meski penggunaan internet di Indonesia meningkat, akses internet belum merata. Dengan begitu, program luring juga perlu dilakukan.

Program luring memang mempunyai kekuatan untuk melibatkan peserta lebih dalam serta menembus khalayak yang tidak sepenuhnya mempunyai akses internet yang baik. Salah satu contoh yang berhasil adalah pelatihan melawan hoaks pandemi secara luring yang dilakukan oleh dosen Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta dan Universitas Gajah Mada di Yogyakarta ketika pandemi. Pelatihan tersebut terlaksana dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan.

Kombinasi program daring dan luring juga bisa dijadikan pilihan. Salah satu contohnya saat konten kampanye daring Jaringan Pegiat Literasi Digital di media sosial digunakan warga secara mandiri untuk kampanye luring di wilayahnya masing-masing.

Keterlibatan warga sebagai subjek dalam program literasi digital sangat penting sehingga mereka ikut memiliki program dan menjadi agen literasi digital dalam komunitasnya masing-masing.

Selain itu, kolaborasi berbagai aktor seperti pemerintah, pendidikan, komunitas, perusahaan teknologi, figur publik termasuk selebritas, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat masih sangat diperlukan untuk mengajak masyarakat Indonesia lebih kritis dalam mengelola informasi yang didapatkan di berbagai platform digital.

Tema Hari Literasi Internasional tahun ini adalah literasi demi pemulihan selama pandemi yang berorientasi pada manusia. Dengan melakukan pendekatan yang beragam dan melibatkan banyak pihak seperti di atas, kami berharap literasi digital yang dilakukan oleh pemerintah bisa fokus pada kebutuhan warganya yang memang sangat ragam dari Sabang hingga Merauke pada masa pandemi ini.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari : **https://theconversation.com/hari-literasi-2021-pemerintah-dan-masyarakat-perlu-kembangkan-terus-pendekatan-yang-beragam-167345**

DISKUSI ONLINE LIVE DI
Instagram Story @infobakti

Design Thinking - Mengapa Ini Penting?

Design Thinking belakangan ini semakin sering disebut sebagai sebuah alternatif pendekatan untuk penyelesaian masalah tertentu termasuk dalam dunia pembangunan. Apa itu *Design Thinking?* Mengapa begitu penting dan populer? Ikuti diskusi BaKTI bersama Dani Wahyu Moenggoro, Founder INSPIRIT – sebuah lembaga yang juga mengusung Design Thinking sebagai salah satu pilar utama dalam memfasilitasi proses kreatif, termasuk dalam merancang dan mengimplementasi program pembangunan.

Memutus Mata Rantai *Bullying*

Apa yang Anda rasakan jika anak atau keluarga Anda mengalami *bullying* atau menjadi pelaku bullying? Tahun 2019 kasus *bullying* mencapai 3.821 kasus, terdapat 126 anak sebagai pelaku bullying dan korban mencapai 51 anak, lebih tinggi dibanding tahun 2018 yang pelakunya mencapai 107 anak dengan korban 46 anak (Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/KPAI) *Bullying* dapat terjadi pada semua orang, dan dapat dihentikan oleh semua orang. Bagaimana Anda berkontribusi memutus mata rantai *bullying?* Simak diskusi kami bersama Kak Pritta Lora Damanik dari UNICEF Indonesia.

Pulang Membangun Kampung

Desa Detosoko Barat Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai desa penyangga Taman Nasional Kelimutu, oleh Ferdinandus Watu (Nando) anak muda sekaligus Kepala Desa Detusoko Barat bersama Remaja Mandiri Community sukses mengembangkan, memanfaatkan potensi wisata menjadi ekowisata yang menyajikan keunikan dan kekayaan seperti alam, budaya dan termasuk manusianya.

Nando Watu berbagi cerita dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat dan bagaimana masyarakat mengelola Bumdes Au Wula.

Artikel

Apakah paradigma Kampus Merdeka bermanfaat untuk mahasiswa dengan disabilitas?

Merdeka Belajar yang diluncurkan pemerintah tahun lalu adalah paradigma baru bagi lembaga pendidikan (khususnya pendidikan tinggi) untuk mendukung pembelajaran mandiri. Merdeka Belajar bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis yang mendukung mahasiswa dan Indonesia untuk mampu bersaing secara global.

Melalui program ini, para siswa dapat menempuh beragam alur untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian. Alur-alur termasuk pengalaman di luar kampus dengan institusi dan industri pendidikan dan non-pendidikan. Pemerintah semakin berupaya agar siswa dengan disabilitas dapat berdaya dalam perjalanan pendidikan mereka. Ini momen yang baik untuk melihat kembali bagaimana institusi pendidikan dan mitra mereka di industri dapat memastikan program ini memberi manfaat bagi siswa-siswa dengan disabilitas.

https://batukarinfo.com/komunitas/articles/apakah-paradigma-kampus-merdeka-bermanfaat-untuk-mahasiswa-dengan-disabilitas

Referensi

Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

Dalam upaya melaksanakan pengembangan kapasitas Analis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) menyusun Panduan Optimalisasi Peran JFAK untuk dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam mengoptimalkan peran Analis Kebijakan di setiap instansi. Ketersediaan Panduan Optimalisasi Peran JFAK menjadi sangat penting untuk membangun pengetahuan para stakeholder terhadap eksistensi JFAK dan peran-peran potensial yang dapat dilakukan oleh para Analis Kebijakan di lingkungannya. Melalui fungsi pembinaan yang dilakukan LAN, ke depan Panduan Optimalisasi Peran JFAK ini dapat menjadi salah satu media pembinaan untuk mendorong peran aktif Analis Kebijakan sebagai think tank kebijakan publik di Indonesia dengan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kebijakan sesuai bidang keahliannya.

https://batukarinfo.com/referensi/panduan-optimalisasi-peran-jabatan-fungsional-analis-kebijakan

Berita Terbaru

Kekerasan Gender Berbasis *Online* Naik Empat Kali Lipat

Berdasarkan data yang dihimpun Komnas Perempuan, angka kasus kekerasan berbasis gender di ruang *online* (KBGO) meningkat dari yang tadinya 241 kasus pada 2019, naik menjadi 940 kasus pada 2020 atau empat kali lipatnya. Hal yang sama dari laporan Lembaga Layanan. Jika pada 2019 hanya terdapat 126 kasus KBGO maka pada 2020 kasus KBGO naik menjadi 510 kasus, atau tiga kali lipatnya.

"Meningkatnya angka kasus kekerasan berbasis gender di ruang *online*/daring ini sepatutnya menjadi perhatian serius semua pihak," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga. Dalam hal pencegahan, ia menyebutkan, perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun ketahanan keluarga termasuk memberikan keamanan pada anak dari ancaman kejahatan digital di media sosial. “Karakteristik dunia digital yang tanpa batas *(borderless)*, saat ini telah memunculkan berbagai kejahatan yang harus diwaspadai, " seru Bintang. Komnas Perempuan menyebutkan, ada 8 bentuk kekerasan berbasis gender *online* yang dilaporkan, yakni upaya memperdaya *(cyber grooming)*, pelecehan *online (cyber harassment)*, peretasan *(hacking)*, konten ilegal *(illegal content)*, pelanggaran privasi *(infringement of privacy)*, ancaman distribusi foto/video pribadi *(malicious distribution)*, pencemaran nama baik *(online defamation)*, dan rekrutmen *online (online recruitment)*.

https://batukarinfo.com/news/kekerasan-gender-berbasis-online-naik-empat-kali-lipat